

**BERITA DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI**

Nomor : 2

Tahun : 2012

**PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2012**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2005-2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan arah dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah Kota Gunungsitoli, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

- kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 8. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
18. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
19. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005 – 2025;
23. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013;
24. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Gunungsitoli;
25. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Gunungsitoli Tahun Anggaran 2012;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI

dan

WALIKOTA GUNUNGSITOLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2005-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Kota Gunungsitoli.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Gunungsitoli sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah Kota Gunungsitoli;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 20 (dua puluh) tahun dihitung sejak tahun 2005 sampai tahun 2025.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Sumatera Utara untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli untuk periode 20 (dua puluh) tahun, dihitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Gunungsitoli untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan 2016.
13. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Gunungsitoli yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Gunungsitoli adalah dokumen perencanaan tata ruang wilayah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
14. Visi adalah perumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17. Arah Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;

BAB II

MAKSUD RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Pasal 2

RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun, yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan 2025, mengikuti perodesasi RPJP Nasional, dan menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 3

Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, disusun sebagai berikut:

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- c. BAB III : Analisis Isu-Isu Strategi;
- d. BAB IV : Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah;
- e. BAB V : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 4

RPJPD sebagaimana dimaksud pasal 3, beserta matriknya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, dan berpedoman pada RTRW Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

RPJPD menjadi pedoman penyusunan RPJMD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam pelaksanaan arah pembangunan kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, yang dijabarkan dalam 4 (empat) tahapan, yaitu:

- a. Tahap Lima Tahun I : RPJMD Tahun 2006 – 2010
- b. Tahap Lima Tahun II : RPJMD Tahun 2011 – 2016
- c. Tahap Lima Tahun III : RPJMD Tahun 2016 – 2021
- d. Tahap Lima Tahun IV : RPJMD Tahun 2021 – 2025

Pasal 7

- (1) RPJPD wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di daerah.
- (2) Walikota melalui SKPD yang tupoksinya bertanggungjawab dalam bidang perencanaan pembangunan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD.

Pasal 8

Setiap periode 5 (lima) tahun dapat diadakan peninjauan kembali terhadap peraturan daerah ini untuk disesuaikan dengan arah pembangunan daerah, perkembangan kehidupan masyarakat, dan kemajuan pembangunan daerah.

Pasal 9

RPJPD ini juga merupakan pedoman bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka RPJPD menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai dengan Tahun 2025, dan dapat diberlakukan sebagai RPJPD transisi, sebagai pedoman penyusunan RPJMD Tahun 2026-2030 sebelum tersusunnya RPJPD Tahun 2025-2045.

- (2) Pada saat peraturan daerah ini mulai berlaku, semua peraturan sederajat atau peraturan di bawahnya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Daerah ini, diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 6 Agustus 2012

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,

dto

MARTINUS LASE

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 8 Agustus 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,



FIRMAN HAREFA

LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2012 NOMOR : 2

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI
TAHUN 2005-2025

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, perlu disusun RPJPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun, dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2025.

RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang daerah, yang penyusunannya mengacu pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJP Nasional, serta berpedoman pada RTRW Kota Gunungsitoli Tahun 2011-2031. Penyusunan RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RPJMD Kota Gunungsitoli secara periodik.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang RPJPD Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 8 SERI E

DAFTAR ISI

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli tentang RPJPD Kota Gunungsitoli....	1
BAB I PENDAHULUAN	10
1.1. Latar Belakang.....	10
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	12
1.3. Hubungan RPJPD Kota Gunungsitoli dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.....	14
1.4. Sistematika Penulisan.....	14
1.5. Maksud dan Tujuan.....	15
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH	16
2.1. Aspek Geografi dan Demografis.....	16
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	28
2.3. Aspek Pelayanan Umum.....	38
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.....	56
BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS	67
3.1. Permasalahan Pembangunan.....	67
3.2. Isu Strategis.....	78
BAB IV VISI DAN MISI DAERAH	86
4.1. Visi.....	86
4.2. Misi.....	87
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH	91
5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah.....	91
5.2. Tahapan dan Prioritas.....	103
BAB VI KAIDAH PELAKSANA	121

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LatarBelakang

Pembangunan suatu daerah dalam jangka panjang pada hakekatnya bertujuan mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan, melalui pemanfaatan potensi sumberdaya lokal secara lestari dengan senantiasa mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin mengglobal. Tujuan pembangunan tersebut merupakan cita-cita yang mengekspresikan hakekat kehidupan masyarakat yang lebih baik, yang perwujudannya membutuhkan upaya-upaya yang terencana, sistematis, komprehensif dan terintegrasi.

Dinamika pembangunan dalam suatu wilayah atau daerah, akan tercermin melalui upaya-upaya konstruktif dan produktif dalam memanfaatkan seoptimal mungkin berbagai potensi sumber daya lokal yang tersedia. Upaya pembangunan dimaksud pada hakekatnya membutuhkan suatu tata rencana yang tepat dan realistis dalam mengarahkan perubahan-perubahan dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan masyarakat. Berdasarkan konstelasi perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka tata rencana yang dibutuhkan tersebut disusun secara hierarkhis, diawali dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Pembangunan Tahunan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah, yang secara makro memuat arah dan kebijakan pembangunan daerah kurun waktu 20 (dua puluh) tahun ke depan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) secara implicit menggambarkan benang merah berbagai dokumen perencanaan pembangunan baik yang sifatnya daerah, regional, nasional maupun sektoral dan lintas sektoral.

Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 47 Tahun 2008, berkewajiban

menyusun berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah dimaksud sebagaimana mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan dimaksud adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2025. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru, berdasarkan periodisasi waktu perencanaan, bertitik tolak pada arah dan kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagai pedoman dalam meletakkan arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah selanjutnya. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan keberadaan berbagai dokumen perencanaan strategis lainnya.

Mencermati orientasi kebutuhan masa depan masyarakat dan Pemerintah Daerah sebagaimana harapan dan cita-cita luhur pembentukan Kota Gunungsitoli, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini disusun berdasarkan kondisi objektif daerah, baik realitas masalah dan kebutuhannya, tantangan maupun realitas potensi yang dimiliki. Untuk mewujudkan kondisi objektif Kota Gunungsitoli dalam 20 tahun kedepan, maka perencanaan pembangunan daerah akan dirancang bangun dalam perspektif perencanaan pembangunan yang berbasis kewilayahan dan pembangunan yang berorientasi manusia.

Perencanaan berbasis kewilayahan mengasumsikan optimalisasi pemanfaatan keunggulan spasial dan potensi lokal, sementara perspektif pembangunan yang berorientasi manusia, dimaksudkan sebagai suatu proses yang mampu memperluas pilihan-pilihan masyarakat, sehingga kelayakan hidup manusia dapat ditempatkan sebagai tujuan utama daripada pembangunan itu sendiri. Kedua perspektif perencanaan pembangunan dimaksud dalam kerangka memperoleh sinergisitas pembangunan daerah yang berdaya saing, akan dilihat sebagai suatu kesatuan yang utuh, yang diimplementasikan secara komprehensif dan terintegrasi dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2025 adalah

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara.
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12 – 815 Tahun 2010 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Walikota Gunungsitoli Propinsi Sumatera Utara.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
20. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara tahun 2003-2018;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang RPJP Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025.
22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2009-2013.
23. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota Gunungsitoli
24. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.
25. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Gunungsitoli.

26. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 4 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gunungsitoli.
27. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Gunungsitoli.
28. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 6 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Gunungsitoli.
29. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Gunungsitoli
30. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemberlakuan Produk-Produk Hukum Daerah Kabupaten Nias Pada Pemerintah Kota Gunungsitoli.
31. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 12 Tahun 2009 tentang Lambang Daerah Kota Gunungsitoli.

1.3. Hubungan RPJPD Kota Gunungsitoli dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2025 disusun dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) serta memperhatikan keberadaan berbagai dokumen perencanaan strategis lainnya baik yang sifatnya nasional maupun daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ini selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2025 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Sistematika Penulisan
- 1.5. Maksud dan Tujuan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Rakyat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

- 3.1. Permasalahan Pembangunan
- 3.2. Isu Strategis

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1. Visi
- 4.2. Misi

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

- 5.1. Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah
- 5.2. Tahapan dan Prioritas

BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

1.5. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli 2005-2025 dimaksudkan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan di Kota Gunungsitoli kurun waktu 20 tahun kedepan. Adapun tujuan penyusunan RPJPD Kota Gunungsitoli 2005-2025 adalah

- a. Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- b. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah dalam lingkup regional maupun nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Gunungsitoli dalam jangka panjang
- c. Sebagai pedoman bagi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas.
- d. Sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan strategis lainnya baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografis

2.1.1. Karakteristik Wilayah dan Lokasi

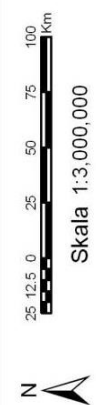
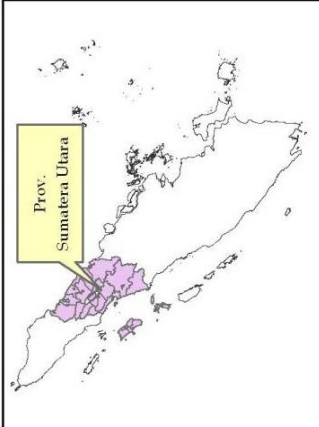

Kota Gunungsitoli adalah kota yang terletak sebuah gugusan pulau yang dikenal dengan nama Kepulauan Nias terletak di sebelah barat Pulau Sumatera, yang secara geografis terletak antara 00°12'-1°32' Lintang Utara (LU) dan 970°00'-980°00' Bujur Timur (BT). Dengan ketinggian rata-rata 0 - 600 meter diatas permukaan laut. Kota Gunungsitoli merupakan salah satu daerah kota di Provinsi Sumatera Utara yang mempunyai jarak ± 85 mil laut dari Sibolga.

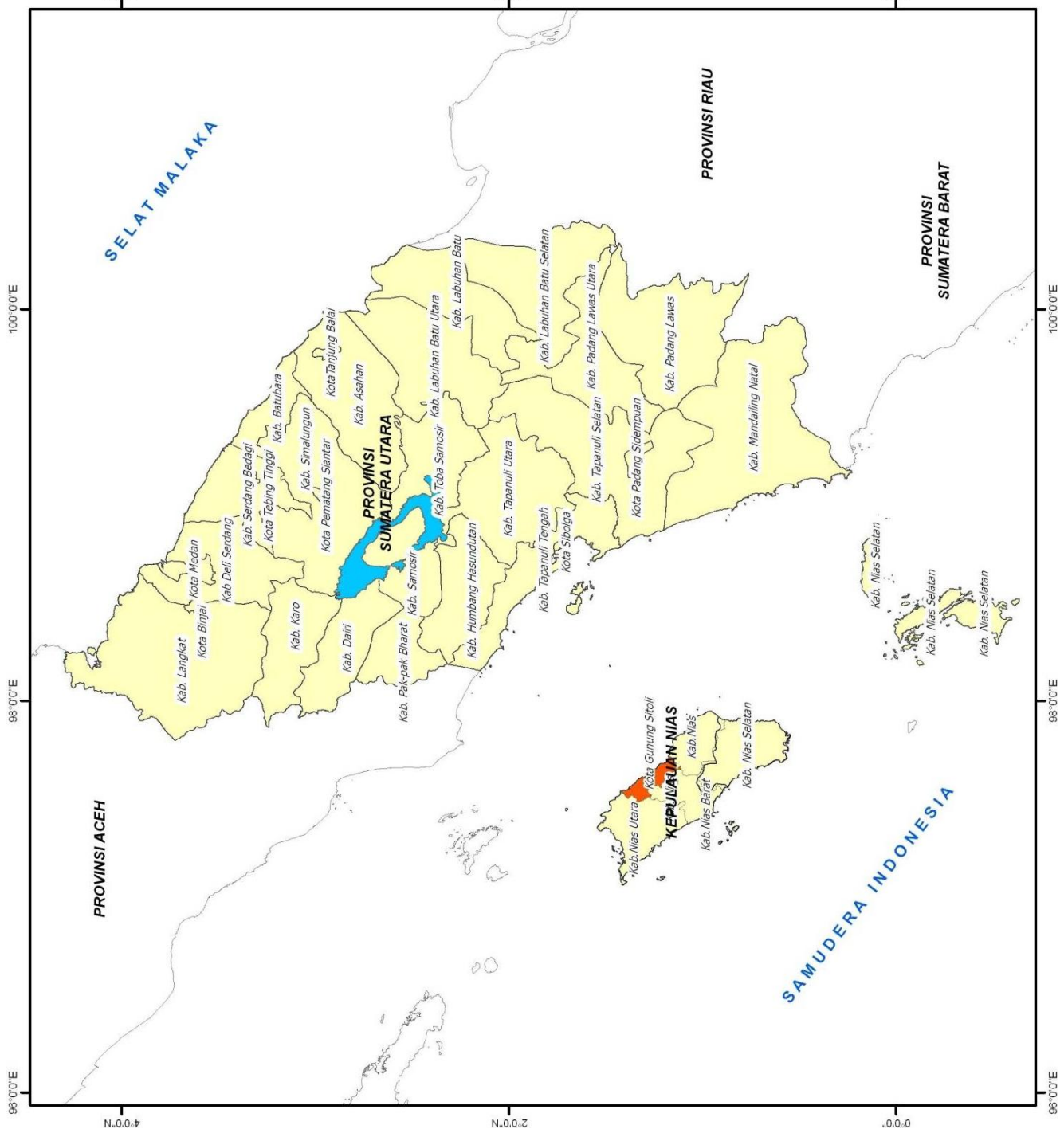
Kota Gunungsitoli merupakan pemekaran dari Kabupaten Nias berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 terdiri atas 6 (enam) kecamatan yaitu Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa, Kecamatan Gunungsitoli, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kecamatan Gunungsitoli Barat, dan Kecamatan Gunungsitoli Idanoi.

Kota Gunungsitoli memiliki luas wilayah 469,36 km² atau 0,38 persen dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara, terdiri dari 6 (enam) Kecamatan, 98 (sembilan puluh delapan) desa dan 3 (tiga) kelurahan. Dari 101 (seratus satu) desa/kelurahan tersebut sebanyak 27 (dua puluh tujuh) desa/kelurahan atau 27 persen terletak di daerah pesisir pantai, dan 74 (tujuh puluh empat) desa atau 73 persen berada di daerah dataran tinggi atau pegunungan.

Secara administratif Kota Gunungsitoli berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Sitolu Öri (Kabupaten Nias Utara)
- Sebelah Timur : Samudera Indonesia.
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gidö dan Kecamatan Hiliserangkai (Kabupaten Nias).
- Sebelah Barat : Kecamatan Hiliduho (Kabupaten Nias) serta kecamatan Alasa Talumuzöi dan Kecamatan Namöhalu Esiwa (Kabupaten Nias Utara).

Peta : 1:1	<div style="text-align: center;">  <p>Skala 1:3,000,000</p> </div>	Keterangan: <ul style="list-style-type: none"> — Batas Administrasi Wilayah ■ Kota Gunung Sitoli ■ Provinsi Sumatera Utara ■ danau 	INDEKS PETA : 	Sumber : Bappeda Kota Gunung Sitoli, 2010 RTRWP Sumatera Utara	
PETA ORIENTASI WILAYAH KOTA GUNUNGSITOLI					PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA



Tabel 2.1
Luas wilayah Kecamatan di Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Luas (Km²)	Rasio Terhadap Luas (%)
01.	Gunungsitoli	109,09	23,24
02.	Gunungsitoli Selatan	56,85	12,11
03.	Gunungsitoli Utara	79,73	16,99
04.	Gunungsitoli Idanoi	134,78	28,72
05.	Gunungsitoli Alo'oa	60,21	12,83
06.	Gunungsitoli Barat	28,70	6,11
Jumlah		469,36 km²	100 %

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Kota Gunungsitoli memiliki kondisi topografi yang bervariasi didominasi oleh daerah perbukitan dan pesisir pantai dengan ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Struktur permukaan tanah banyak dialiri sungai kecil, sedang dam besar yang sebagian besar dapat ditemui hampir di seluruh kecamatan.

Di samping itu struktur batuan dan susunan tanah di Kota Gunungsitoli pada umumnya bersifat labil, mengakibatkan sering terjadinya patahan pada jalan-jalan aspal dan longsor, demikian juga sering ditemui daerah aliran sungai yang berpindah-pindah.

Keadaan iklim Kota Gunungsitoli sangat dipengaruhi oleh Samudera Hindia dengan curah hujan mencapai 3.022 mm pertahun atau banyak hari hujan mencapai 254 hari dalam setahun. Curah hujan yang paling besar terjadi pada bulan November dengan banyaknya hari hujan mencapai 27 hari sedangkan curah yang paling rendah terjadi pada bulan Pebruari.

Suhu udara dalam satu tahun rata-rata 26° C per bulan dengan rata-rata minimum 21° C dan rata-rata maksimum 31° C. Kecepatan angin rata-rata dalam satu tahun sebesar 5 knot/jam dan bisa mencapai rata-rata kecepatan maksimum sebesar 23 knot/jam dengan arah angin terbanyak berasal dari arah utara. Curah hujan yang tinggi setiap tahun

mengakibatkan kondisi alam Kota Gunungsitoli sangat lembab dan basah dengan rata-rata kelembaban antara 89 - 92 % serta sering mengalami banjir bandang.

Berdasarkan penggunaan lahan eksisting Kota Gunungsitoli pada tahun 2010 diperoleh penggunaan lahan yang di dominasi oleh pertanian lahan kering dengan luas 16.872 Ha, Hutan Lindung seluas 6.146 Hektar, dan kawasan permukiman dengan luas 1.245 Ha. Pola penggunaan Kota Gunungsitoli diakhir tahun perencanaan akan mengalami perubahan. Penambahan luas untuk kawasan budidaya akan mengalami perkembangan yang sangat besar, terutama untuk kawasan permukiman, fasilitas umum, sedangkan untuk kawasan lindung akan mengalami pengurangan akibat pembangunan kota. Untuk itu perlu penetapan kawasan yang tidak dapat dialih fungsikan dalam pengendalian pemanfaatan ruang.

Tabel 2.2
Guna Lahan Eksisting Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Guna lahan eksisting											
		Hutan	Mangrove	Rawa Gambut	Pantai	Badan Air	Lahan Terbuka	Pertanian Lahan Kering	Sawah	Perkebunan	Kawasan Wisata	Ruang Terbuka Hijau	Jumlah
1	Gunungsitoli Idanoi	2.114,35	-	-	-	33,56	0,62	3.180,77	184,03	-	-	-	5.513,33
2	Gunungsitoli Utara	553,81	151,74	100,05	7,50	70,22	9,74	4.482,25	347,19	103,43	0,78	-	5.826,70
3	Gunungsitoli	776,60	-	-	0,27	15,20	13,90	3.042,04	52,79	-	2,09	4,70	3.907,58
4	Gunungsitoli Alo'oa	696,18	-	-	-	14,91	-	3.219,42	108,76	-	-	-	4.039,26
5	Gunungsitoli Barat	1.341,26	-	-	-	12,99	-	1.507,20	-	21,07	0,14	0,14	2.882,79
6	Gunungsitoli Selatan	2.505,34	-	-	-	40,60	21,09	1.440,87	115,46	78,09	-	-	4.201,46
J u m l a h		7.987,54	151,74	100,05	7,77	187,48	45,35	16.872,55	808,22	202,60	3,01	4,83	26.371,13

No	Kecamatan	Guna lahan eksisting							Jumlah
		Kawasan Fasilitas Kesehatan	Kawasan Fasilitas Umum	Kawasan Pemukiman	Kawasan Pendidikan	Kawasan Perdagangan Dan Jasa	Kawasan Perkantoran	Kawasan Militer	
1	Kec. Gunungsitoli Idanoi	0,14	33,76	196,95	11,43	1,97	4,00	-	248,26
2	Kec. Gunungsitoli Utara	0,24	2,18	219,00	8,15	-	0,34	-	229,90
3	Kec. Gunungsitoli	3,64	13,41	498,63	22,33	56,59	13,35	2,70	610,64
4	Kec. Gunungsitoli Alo'oa	0,11	0,49	82,07	2,20	-	0,38	-	85,24
5	Kec. Gunungsitoli Barat	-	1,24	89,08	3,94	-	0,31	-	94,57
6	Kec. Gunungsitoli Selatan	0,35	1,17	159,37	10,97	0,30	2,96	-	175,11
J u m l a h		4,47	52,24	1.245,11	59,02	58,86	21,33	2,70	1.443,72

Sumber Perhitungan , GIS 2010

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah dengan pendekatan nilai strategis kawasan dimaksudkan untuk mengembangkan, melestarikan, melindungi dan mengkoordinasikan keterpaduan pembangunan nilai strategis kawasan yang bersangkutan demi terwujudnya pemanfaatan yang berhasil guna, berdaya guna, dan berkelanjutan. Rencana kawasan strategis kabupaten/kota merupakan rencana rinci untuk potensi pengembangan wilayah kota. Penetapan kawasan strategis pada setiap jenjang wilayah administratif didasarkan pada pengaruh yang sangat penting terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan.

Kawasan strategis Kota Gunungsitoli yang diusulkan berdasarkan potensi, antara lain :

a. Kawasan Strategis Ekonomi, meliputi:

- 1) Kawasan pertumbuhan perekonomian di wilayah Nazalou lolowua, Teluk Belukar, Oloro, Tuhegeo I, Ilir, Pasar gunungsitoli dan Saombo.
- 2) Kawasan pengembangan industri di wilayah teluk belukar dan oloro.
- 3) Kawasan pariwisata bahari di teluk belukar, afia, pasar gunungsitoli, turendra, fowa dan pendukung pariwisata berupa perhotelan dan prasarana tempat hiburan di wilayah PPK.
- 4) Kawasan pengembangan pendidikan di wilayah Gunungsitoli dan Gunungsitoli Idanoi.

b. Kawasan strategis sosial dan budaya meliputi:

- 1) Kawasan budaya/rumah adat
- 2) Kawasan situs batu megalith dan
- 3). Kawasan tempat bersejarah

c. Kawasan Strategis Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup meliputi Daerah Rawan bencana tsunami di sepanjang pesisir pantai Kota Gunungsitoli

d. Kawasan Strategis Sumber Daya Alam meliputi kawasan pertambangan di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa.

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Wilayah Kota Gunungsitoli pada hakekatnya merupakan daerah rawan bencana khususnya bencana alam geologi sebagaimana wilayah Kepulauan Nias pada umumnya.

a. Bencana Gempa Bumi

Data kegempaan di empat wilayah Kabupaten/Kota di Pulau Nias (Kabupaten Nias Utara, Nias Barat, Nias dan Kota Gunungsitoli) untuk kurun waktu sepuluh tahun terakhir (2000 – 2009) memperlihatkan adanya aktivitas gempa yang cukup tinggi. Pusat-pusat gempa terutama terjadi di sepanjang pantai (barat-utara-timur) dan juga terjadi di daratan dengan kedalaman umumnya dangkal (< 60 km) dengan kekuatan magnitudo rata-rata berkisar 0 – 3,9 SR, sebagian berkekuatan 4 – 4,9 SR dan hanya beberapa berkekuatan 5 – 9,9 SR. Skala Intensitas gempa umumnya berkisar VI – IX MMI (*Modified Mercalli Intensity*) untuk kekuatan gempa 6 – 9 SR, untuk gempa bumi dengan kekuatan < 6 SR intensitas gempa lebih kecil dari skala V atau IV MMI.

Potensi bencana yang diakibatkan oleh gempa bumi terutama disebabkan oleh adanya guncangan tanah (*ground shaking*), geseran tanah (*ground faulting*) dan gelombang pasang (*tsunami*). Besarnya guncangan saat terjadi gempa bumi ditandai oleh : magnitudo atau besarnya kekuatan gempa, kedalaman dan jarak dari pusat gempa serta sifat fisik maupun struktur batuan dan sifat dari bangunan baik jenis, kualitas maupun umur bangunan.

Peristiwa gempa 28 Maret 2005 menyebabkan kehancuran yang signifikan di wilayah Kota Gunungsitoli. Kehancuran tersebut terutama disebabkan oleh kondisi batuan yang bersifat kurang kompak (endapan alluvial, koral) mengalami guncangan yang lebih kuat saat terjadi gempa. Ditambah lagi dengan jumlah bangunan yang cukup banyak dan rapat dengan kondisi/kualitas bangunan yang kurang memadai dibangun di atas alluvial atau timbunan lahan terumbu karang/koral. Kondisi demikian yang menyebabkan resiko bencana gempa di wilayah Gunungsitoli tergolong tinggi. Melihat kondisi geologi/tektonik Pulau Nias yang memang sangat rawan

terjadi gempa, maka berdasarkan kondisi kegempaan yang umumnya berkekuatan $< 3,9 - 4,9$ SR dengan kedalaman dangkal dan dengan memperhatikan kondisi batuan penyusun serta struktur geologi yang berkembang, maka potensi bencana gempa bumi di Kota Gunungsitoli dibagi atas dua, yaitu :

1. Kawasan rawan bencana gempa bumi sangat tinggi, berada pada wilayah yang disusun oleh batuan yang bersifat lepas atau kurang kompak, yaitu endapan alluvial (Qa) dan terumbu karang dari Formasi Gunungsitoli (QTg). Kawasan ini terutama di Kecamatan Gunungsitoli Utara, bagian timur (sepanjang pantai) Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan.
2. Kawasan rawan bencana gempa bumi tinggi, berada pada daerah yang disusun batuan sedimen dari Formasi Gomo (Tm_{pg}) dan Formasi Lölömatua (Tml), yaitu di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dan Gunungsitoli Idanoi, serta dibagian barat Kecamatan Gunungsitoli dan Gunungsitoli Selatan.

b. Bencana Tsunami

Tsunami merupakan gelombang yang panjang (*long wave*) yang dapat mencapai 100 kilometer, dimana naiknya atau terjadinya gelombang panjang tersebut disebabkan oleh adanya implusif dari dasar laut atau dasar permukaan air. Gangguan implusif disebabkan oleh adanya gempa bumi tektonik, letusan gunung api, longsoran di dasar laut atau kombinasi ketiganya. Artinya tsunami hanya berpotensi terjadi bila gempa buminya berada di laut dan pada dasar laut terjadi perubahan morfologi akibat perpindahan massa batuan berupa patahan/sesar naik atau sesar turun saat terjadi gempa. Berdasarkan hal tersebut, maka akan ada hubungan antara kekuatan gempa dengan tsunami, dimana potensi tsunami akan terjadi bila kekuatan gempanya lebih besar dari 6,5 SR dan kedalaman gempanya tergolong dangkal (< 60 km atau mencapai 80 km). Dari ketiga penyebab tsunami tersebut, tsunami akibat gempa tektonik yang sering terjadi bahkan yang paling banyak menimbulkan bencana, baik korban jiwa maupun harta benda.

Kecepatan Bergeraknya tsunami berbanding lurus dengan kedalaman, kecepatan akan tinggi bila di kedalaman dan semakin berkurang kecepatannya pada wilayah atau kedalaman yang dangkal. Kondisi tersebut mengakibatkan ketinggian gelombang saat mencapai pantai meningkat karena terjadi akumulasi air dan diikuti peningkatan energi, terutama di pantai yang cekung atau pantai yang berbentuk teluk atau kawasan pantai yang kemiringan lerengnya tergolong datar.

Di wilayah Gunungsitoli, kawasan yang paling rawan terjadi tsunami adalah kawasan pantai timur dengan ketentuan bila terjadi gempa yang bersumber dari laut di bagian timur dengan kekuatan $> 6,5 / > 7$ SR atau bila sumber gempa berasal dari bagian utara Pulau Nias dan dengan kekuatan yang lebih besar dari $8/9$ SR. Hal lain yang juga mempengaruhi terjadi tsunami di sepanjang pantai adalah bentuk topografi serta bentuk pantainya, terutama pada pantai dengan topografi datar dan berbentuk teluk serta keberadaan sungai besar yang dapat memicu tingginya perluasan genangan tsunami. Berdasarkan hal-hal tersebut kawasan rawan bencana tsunami di Kota Gunungsitoli terutama di empat kecamatan khususnya di sepanjang wilayah pantainya, yaitu di :

1. Kecamatan Gunungsitoli Utara, seluruh kawasan dipantai timurnya. Keberadaan sungai besar yang bermuara kelaut menambah tingkat kerawanannya, yaitu sungai Sawo dan sungai Gamo.
2. Kecamatan Gunungsitoli, terutama dibagian tengah pantai timurnya atau di pantai sekitar kota Gunungsitoli. Bentuk pantai berupa teluk dapat memicu tingkat kerawanannya. Dibagian selatan dan sebagian utara dari pantai timur topografinya mulai berelief yang disusun oleh terumbu karang/koral (tidak datar), sehingga kemungkinan tsunami di kawasan tersebut lebih rendah.
3. Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, seluruh pantainya berupa dataran dipicu lagi oleh adanya sungai besar di bagian utara, yaitu sungai Idanoi, Sungai Ndraha Humene, dan Sungai Fowa;

4. Kecamatan Gunungsitoli Selatan, terutama di pantai bagian selatan dan bagian utara berupa dataran, sedangkan di bagian tengah adanya terumbu karang dengan topografi yang berrelief mengurangi tingkat kerawanan tsunami.

c. Bencana Longsor/Gerakan Tanah

Potensi gerakan tanah di Kota Gunungsitoli berdasarkan kondisi geologi dipengaruhi oleh kondisi stratigrafi batuan sedimen Formasi Lōlōmatua dan Formasi Gomo) yang terdiri dari perselingan perlapisan batu pasir dibagian atas dan batu lempungan dibagian bawah.

Bila musim hujan atau curah hujan cukup tinggi, akan terjadi peningkatan berat masa batuan dibagian atas dan mengakibatkan gaya pendorong masa batuan di atas lereng lebih besar dibanding gaya penahan dan akhirnya terjadi pergerakan masa batuan/tanah atau longsor. Potensi longsor juga dapat terjadi pada batuan yang telah mengalami pelapukan dan menghasilkan batuan lapuk yang cukup tebal. Bila kondisi batuan demikian berada pada topografi dengan kemiringan lereng yang besar, dan dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga dapat terjadi longsor. Bila kondisi batuan demikian berada pada topografi dengan kemiringan lereng yang besar, dan dipicu oleh curah hujan yang cukup tinggi, juga dapat terjadi longsor. Curah hujan di Kota Gunungsitoli tergolong tinggi sebesar 2500-3500 mm/thn sehingga dapat memicu terjadinya longsor.

Curah hujan yang juga tergolong tinggi dan guncangan gempa bumi yang memang sering terjadi di wilayah Pulau Nias serta adanya aktivitas manusia yang mengurangi kemampuan lahan menyerap air menjadi pemicu terjadinya gerakan tanah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka wilayah Kota Gunungsitoli yang rentan terhadap bencana longsor di Kecamatan Gunungsitoli (terutama di Desa Sisarahili Sisambalahe bagian barat daya), Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa (di Desa Lōlōlawa) Kecamatan Gunungsitoli Barat (terutama di Desa Lōlōmoyo Tuhemberua), dan di Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (terutama di Desa Hilimbawa Desōlō, Desa Tetehōsi I, Desa

Tetehōsi II) Kecamatan Gunungsitoli Selatan (di Desa Lōlōlakha, Desa Ombōlata Simanairi, Hiligodu, Onozitoli Tabaloho, Hiligara, Ononamōlō I Lot) .

d. Banjir

Berdasarkan hukum air dan gravitasi, wilayah yang berpotensi banjir adalah daerah dataran yang relatif rendah. Menurut buku Inventarisir Geologi Teknik Daerah Kota Gunungsitoli dan sekitarnya (*Direktorat Geologi Teknik, 2006*), daerah banjir yang sering terjadi umumnya pada pantai barat, timur dan selatan Pulau Nias. Di daerah timur pulau Nias kawasan rawan bencana banjir berada di daerah Kecamatan Gunungsitoli (daerah pasar Nou, Kelurahan Ilir) , Kecamatan Gunungsitoli Idanoi (di Desa Hiliweto Idanoi, Desa Tetehōsi I, Desa Tetehōsi II, Desa Lōlōana'a, Desa Siwalubanua I), Kecamatan Gunungsitoli Utara, Kecamatan Gunungsitoli Selatan (di Desa Ononamōlō I Lot, Luaha Laraga, Sihare'ō) dan Kecamatan Gunungsitoli Barat.

Khususnya daerah Gunungsitoli yang sering terkena banjir akibat meluapnya Sungai Nou (DAS Idanoi). Daerah yang sering terkena banjir ini pada bagian permukaannya dibentuk oleh lempung hingga pasir lanauan. Banjir yang disebabkan oleh luapan air sungai membentuk pola yang sebagian mengikuti aliran sungai dan sebagian lagi tak beraturan (*braided*). Banjir di Kecamatan Gunungsitoli Selatan (di desa Ononamōlō I Lot,) disebabkan karena adanya kegiatan penggalian tipe c disekitar sungai yang menyebabkan ketinggian bibir sungai rendah dan sungai menjadi dangkal.

2.1.4. Demografis

Jumlah penduduk Kota Gunungsitoli berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 adalah 126.202 jiwa, yang tersebar di enam wilayah kecamatan. Penduduk Kota Gunungsitoli berdasarkan jenis kelamin menunjukkan penduduk berjenis kelamin laki-laki sebesar 49 persen (61.839 jiwa) sementara penduduk berjenis kelamin perempuan sebesar 51 persen (64.363 jiwa). Penduduk paling banyak berada di Kecamatan Gunungsitoli berjumlah 60.625 jiwa, sedangkan jumlah

yang paling sedikit berada di Kecamatan Alo'oa sebesar 6.708 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kota Gunungsitoli kurun waktu 6 tahun terakhir sekitar 3.09 persen. Jumlah penduduk di Kota Gunungsitoli sebagian besar terkonsentrasi di Kecamatan Gunungsitoli sebagai akibat dari kedudukan Kecamatan Gunungsitoli sebagai ibukota Gunungsitoli dengan tingkat kegiatan perekonomian yang tinggi dan didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang lebih memadai.

Perkembangan jumlah pendudukan berdampak pada peningkatan luasan kawasan budidaya khususnya permukiman dan juga menyebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk pada suatu kawasan. Kepadatan penduduk bruto diperoleh dari hasil perbandingan jumlah penduduk dengan luasan wilayah. Pada tahun 2010, Kota Gunungsitoli memiliki jumlah penduduk sebesar 126.202 jiwa dengan luas wilayah 469.36 Km², dengan demikian dapat diketahui bahwa kepadatan penduduk Kota Gunungsitoli adalah 268 Jiwa/Km². Pasar Gunungsitoli memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni sebesar 9.077 Jiwa/Km² sedangkan Desa Fadoro Hilimböwö memiliki kepadatan penduduk terendah yang hanya mencapai 60 Jiwa/ Km².

Jumlah penduduk Gunungsitoli berdasarkan struktur umur pada tahun 2010 diketahui bahwa jumlah usia sekolah (5-19 Tahun) di Kota Gunungsitoli tercatat sebanyak 42.809 Jiwa. Jumlah angka penduduk usia sekolah ini masih belum semua ditampung oleh 323 unit sekolah yang semuanya terkonsentrasi di pusat kota saja. Demikian jumlah angkatan kerja (20-49 Tahun) sebanyak 67.127 jiwa yang harus bekerja untuk memajukan ekonomi kota Gunungsitoli, tetapi kenyataannya masih banyak angkatan kerja yang masih belum/tidak bekerja.

Berdasarkan mata pencaharian penduduk di Kota Gunungsitoli, diketahui bahwa mata pencaharian yang dominan di Kota Gunungsitoli tahun 2010 adalah sebagai petani dengan jumlah 31.969 Jiwa, kemudian bermatapencaharian sebagai wiraswasta 14.843. Tingkat pengangguran tertutup dan terbuka sebanyak 64.828 jiwa (Pelajar/Tidak Bekerja). Jumlah penduduk yang tidak bekerja di Kota Gunungsitoli dapat dikurangi dengan pembukaan lapangan pekerjaan

yang menyerap tenaga kerja yang banyak, antara lain pembangunan industri pengolahan hasil pertanian dan perkebunan yang membutuhkan lapangan usaha yang lebih besar maupun pengembangan sistem padat karya.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Total nilai tambah/PDRB atas dasar harga berlaku yang dihasilkan oleh seluruh sektor ekonomi di Kota Gunungsitoli pada tahun 2010 adalah sebesar Rp 2.01 triliun. Sektor pertanian menghasilkan jumlah nilai tambah/PDRB sebesar Rp 251,07 milyar, pertambangan dan penggalan sebesar Rp 6,36 milyar, industri pengolahan sebesar Rp 60,46 milyar, listrik, gas, dan air bersih sebesar Rp 10,17 milyar bangunan sebesar Rp 272,25 milyar, perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 691,64 milyar, pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 326,95 milyar. Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp 225,50 milyar, dan jasa-jasa sebesar Rp 164,67 milyar.

Total nilai tambah/PDRB atas dasar harga konstan 2000 tahun 2010 adalah sebesar Rp 867,97 milyar, yang dihasilkan dari sektor pertanian dengan jumlah nilai tambah/PDRB sebesar Rp 81,40 milyar, pertambangan dan penggalan sebesar Rp 2,75 milyar, industri pengolahan sebesar Rp 21,95 milyar, listrik, gas dan air bersih sebesar Rp 3,91 milyar, bangunan sebesar Rp 121,77 milyar, perdagangan, hotel dan restoran sebesar Rp 387,22 milyar, pengangkutan dan komunikasi sebesar Rp 139,55 milyar, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar Rp 44,29 milyar dan jasa-jasa sebesar Rp 65,14 milyar.

Tabel 2.3 PDRB Kota Gunungsitoli Menurut Lapangan Usaha/Sektor Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2010 (juta Rp.)

Lapangan Usaha/Sektor	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
(1)	(2)	(3)
1. Pertanian	251.065,15	81.398,31
2. Pertambangan dan Penggalian	6.357,59	2.754,96
3. Industri Pengolahan	60.461,97	21.950,62
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	10.165,76	3.913,04
5. Bangunan	272.249,67	121.768,15
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	691.637,71	387.217,02
7. Pengangkutan dan Komunikasi	326.945,40	139.549,20
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	225.500,50	44.284,77
9. Jasa-Jasa	164.673,97	65.138,25
PDRB Kota Gunungsitoli**	2.009.057,71	867.974,32

**) Angka Sangat Sementara

Sejak tahun 2006 hingga 2010 total nilai tambah/PDRB Kota Gunungsitoli atas dasar harga berlaku terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 16,14 persen per tahun. Bila dibandingkan dengan keadaan tahun 2009, maka total nilai tambah/PDRB Kota Gunungsitoli Tahun 2010 atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari Rp 1.775.104,56,- (juta) pada tahun 2009 menjadi Rp 2.009.057,71,- (juta).

Total nilai tambah/PDRB atas dasar harga konstan pada tahun 2010 juga mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2009 yaitu dari Rp. 813.260,17,- (juta) menjadi Rp 867.974,32,- (juta).

Gambaran perkembangan PDRB Kota Gunungsitoli periode 2007-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4 Perkembangan PDRB Kota Gunungsitoli Atas Dasar Harga Berlaku dan Konstan 2000 Tahun 2006-2010 (juta Rp.)

Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku	Atas Dasar Harga Konstan
2007 ^r	1.287.731,08	704.725,12
2008	1.495.456,72	756.845,40
2009 [*]	1.775.104,56	813.260,17
2010 ^{**}	2.009.057,71	867.974,32
Rata-Rata Pertumbuhan Pertahun (persen)	9,60	5,40

r) Angka Perbaikan

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu ukuran dari hasil pembangunan yang dilaksanakan khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan rangkuman laju pertumbuhan dari berbagai sektor ekonomi yang menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi. Untuk melihat fluktuasi pertumbuhan ekonomi tersebut secara riil dari tahun ke tahun, disajikan melalui PDRB atas dasar harga konstan 2000 menurut lapangan usaha secara berkala. Pertumbuhan yang positif menunjukkan adanya peningkatan perekonomian, sebaliknya apabila negative menunjukkan penurunan.

Pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli dari tahun 2007 hingga 2010, mengalami peningkatan dengan pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2008 pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli sebesar 7,40 Persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi pada tahun 2008 adalah bangunan sebesar 15,49 persen, hal ini disebabkan masih berlangsungnya proses rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana alam gempa bumi. Tahun 2009 meningkat dari 7,40 persen menjadi 7,45 persen. Pertumbuhan ini didukung meningkatnya sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 14,18 persen, terutama peningkatan produksi angkutan penumpang disub sektor angkutan udara serta produksi komunikasi. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli mengalami perlambatan menjadi 6,73 persen. Sektor yang mengalami pertumbuhan paling tinggi adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa keuangan sebesar 17,35 persen. Pertumbuhan

ini disebabkan meningkatnya nilai tambah bank dan didirikannya beberapa perusahaan jasa asuransi di Kota Gunungsitoli. Gambaran laju pertumbuhan ekonomi Kota Gunungsitoli periode 2008-2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.5 Laju Pertumbuhan PDRB Kota Gunungsitoli 2008 - 2010 (%)

Sektor/Lapangan Usaha	Tahun			
	2007	2008	2009*	2010**
(1)		(2)	(3)	(4)
1. Pertanian	4,65	3,45	4,64	4,44
2. Pertambangan dan Penggalian	5,65	1,06	0,98	3,13
3. Industri Pengolahan	2,53	5,09	4,65	3,42
4. Listrik, Gas, dan Air Bersih	10,56	9,04	3,72	8,19
5. Bangunan	24,31	15,49	11,45	7,94
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	3,89	5,25	5,59	4,05
7. Pengangkutan dan Komunikasi	10,06	13,86	14,18	13,20
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	7,41	5,56	7,71	17,35
9. Jasa-Jasa	9,30	3,82	4,31	5,36
Laju Pertumbuhan Ekonomi/PDRB	7,57	7,40	7,45	6,73

*) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

b. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi nilai barang dan jasa. Angka PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi jumlah nilai PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Gunungsitoli tahun 2007 hingga 2010 cenderung mengalami peningkatan, yaitu dari Rp.11.038.894,- per kapita per tahun pada tahun 2007 menjadi Rp. 15.919.381,- per kapita per tahun pada tahun 2010. Kondisi PDRB Perkapita Kota Gunungsitoli secara umum belum mencerminkan keadaan sesungguhnya taraf kesejahteraan masyarakat. Ketidakmerataan distribusi pendapatan antar wilayah serta disparitas pembangunan antar wilayah secara

kasat mata masih dapat dijumpai di wilayah Kota Gunungsitoli. Mengingat Kota Gunungsitoli merupakan daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nias, maka analisa mendalam tentang kesenjangan distribusi pendapatan maupun ketimpangan pembangunan antar wilayah relatif sulit dilakukan karena keterbatasan data yang tersedia, antara lain : distribusi PDRB per kecamatan.

c. Laju Inflasi

Laju inflasi di wilayah Kota Gunungsitoli relatif sangat fluktuatif dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Sumatera Utara. Tingginya biaya transportasi yang dibebankan pada ongkos produksi dan terbatasnya produsen barang, sebagai faktor utama sering munculnya fluktuasi inflasi di Kota Gunungsitoli. Laju inflasi di Kota Gunungsitoli tahun 2009 sebesar 9,17% dan tahun 2010 meningkat sebesar 14,84%.

2.2.2 Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan pada hakekatnya merupakan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sebagai aset masa depan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi kesejahteraan masyarakat. Kondisi pembangunan sektor pendidikan di Kota Gunungsitoli kurun waktu dua tahun setelah menjadi daerah otonom baru, secara umum diarahkan pada penyelenggaraan kegiatan kependidikan yang berkualitas, antara lain melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan kualitas pendidik, tenaga kependidikan dan peserta didik, serta peningkatan sarana pembelajaran lainnya. Beberapa indikator yang digunakan untuk melihat aspek kesejahteraan masyarakat dari sektor pendidikan antara lain : Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Partisipasi Kasar.

Angka Melek Huruf di Kota Gunungsitoli tahun 2010 sebesar 94,75 persen dimana jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis sebanyak 76.032 jiwa dari jumlah penduduk usia 15 tahun keatas yang berjumlah 81.301 jiwa. Angka Melek Huruf ini lebih rendah dari angka melek huruf Sumatera Utara sebesar 98.08 persen.

Tabel 2.6
Kondisi Angka Melek Huruf Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2010
1	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis	77.032
2	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas	81.301
3	Angka melek huruf	94,75

Sumber :BPS Kabupaten Nias

Kondisi angka melek huruf di Kota Gunungsitoli menunjukkan bahwa masih terdapat potensi penduduk yang belum bebas dari masalah buta huruf, sehingga dibutuhkan upaya penanganan yang komprehensif dari pemerintah daerah dalam rangka pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan. Upaya pembebasan masyarakat dari masalah buta huruf pada hakekatnya merupakan salah satu indikator penting dalam mengurangi tingkat kemiskinan dan peningkatan daya saing daerah khususnya pengembangan potensi sumber daya manusia.

Angka Partisipasi Murni (APM) di Kota Gunungsitoli tahun 2010 yaitu SD/MI sebesar 107,69 persen, SMP/MTs sebesar 83,01 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 61,05 persen. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Gunungsitoli ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata angka pertisipasi murni Sumatera Utara yakni SD/MI sebesar 93,46 persen,SMP/MTs sebesar 91,56 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 67,55 persen.

Tabel 2.7
Keadaan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Jenjang Pendidikan	2010
1	SD/MI	
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	18.787
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	17.444
1.3.	APM SD/MI	107,69
2	SMP/MTs	
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.241
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.723
2.3.	APM SMP/MTs	83,01
3	SMA/MA/SMK	
3.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	4.925
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.112
3.3.	APM SMA/MA/SMK	61,05

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli

Pada tahun 2010 Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Gunungsitoli yaitu SD/MI sebesar 113,37 persen, SMP/MTs sebesar 93,5 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 64,25 persen. Angka Partisipasi Kasar (APK) ini relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata angka partisipasi kasar Provinsi Sumatera Utara untuk tingkat SMP/MTs sebesar 99,49 persen dan SMA/MA/SMK sebesar 81,21 persen.

Tabel 2.8
Keadaan Angka Partisipasi Kasar(APK) Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Jenjang Pendidikan	2010
1	SD/MI	
1.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SD/MI	19.776
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	17.444
1.3.	APK SD/MI	113,37
2	SMP/MTs	
2.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMP/MTs	7.622
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.723
2.3.	APK SMP/MTs	87,39
3	SMA/MA/SMK	
3.1.	jumlah siswa yang bersekolah di jenjang pendidikan SMA/MA/SMK	5.212
3.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.112
3.3.	APK SMA/MA/SMK	64,25

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli

b. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan di Kota Gunungsitoli secara umum bertujuan untuk mengoptimalkan akses masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar di bidang kesehatan. Untuk mengoptimalkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kota Gunungsitoli, kebijakan pembangunan sektor kesehatan diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, pengadaan perbekalan kesehatan, peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat, dan penanganan penyakit menular dan gizi buruk. Kondisi pembangunan sektor kesehatan di Kota Gunungsitoli dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) di Kota Gunungsitoli tahun 2010 sebesar 944 per 1.000 KH.

Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan pada masa mendatang harus semakin ditingkatkan baik dari aspek kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan.

2. Angka Kematian Bayi di Kota Gunungsitoli tahun 2010 sebesar 56 per 1.000 KH.

Kondisi angka kematian bayi di Kota Gunungsitoli tahun 2010 masih relatif lebih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata kematian bayi tingkat Provinsi Sumatera Utara. Kondisi angka kematian bayi yang relatif masih tinggi, menunjukkan belum optimalnya penanganan kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan di Kota Gunungsitoli.

3. Angka Kematian Ibu sebesar 357 per 10.000 KH.

Kondisi angka kematian ibu di Kota Gunungsitoli tahun 2010 relatif masih lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi nasional maupun Provinsi Sumatera Utara. Hal ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan masih relatif rendah. Rendahnya kualitas ini sangat dipengaruhi oleh upaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat khususnya bagi ibu hamil dan ibu melahirkan.

4. Angka Harapan Hidup sebesar 68 tahun.

Kondisi angka harapan hidup yang semakin meningkat, menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat yang semakin meningkat. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat sangat dipengaruhi taraf kesejahteraan masyarakat itu sendiri dan kapasitas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat.

5. Persentase balita gizi buruk sebesar 8 persen

Kondisi balita gizi buruk di Kota Gunungsitoli relatif lebih baik dibandingkan dengan daerah otonom lain di wilayah Kepulauan Nias. Keadaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan yang relatif lebih memadai dan akses layanan kesehatan yang relatif terjangkau oleh sebagian besar masyarakat Kota Gunungsitoli.

c. Kemiskinan

Pada Tahun 2010 jumlah penduduk miskin di Kota Gunungsitoli sebanyak 42.724 jiwa (33,85 persen) dari jumlah penduduk sebanyak 126.202 jiwa, yang tersebar di perkotaan

maupun di pedesaan. Hal ini menggambarkan besaran potensi penduduk miskin atau penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar di Kota Gunungsitoli relatif masih tinggi. Penduduk Kota Gunungsitoli yang berada di bawah garis kemiskinan dan rentan jatuh di bawah garis kemiskinan, memiliki potensi yang sangat besar. Kondisi ini seyogyanya harus segera disikapi melalui sejumlah kebijakan pembangunan, baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral sebagai salah upaya percepatan aksesibilitas masyarakat terhadap peningkatan produktivitas dalam berbagai aspek dan dimensi perekonomian.

Angka kemiskinan di Kota Gunungsitoli relatif masih tinggi dibandingkan dengan angka rata-rata nasional maupun angka rata-rata provinsi Sumatera Utara. Masalah kemiskinan di Kepulauan Nias pada umumnya dan Kota Gunungsitoli khususnya merupakan masalah klasik yang sudah berlangsung lama. Momentum pemekaran Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru, diharapkan secara bertahap akan lebih mengoptimalkan penanganan kemiskinan di Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias pada umumnya.

2.2.3 Seni Budaya dan Olah Raga

Kota Gunungsitoli yang dihuni sebagian besar etnis Nias, memiliki ragam khasanah budaya dengan keanekaragaman seni budaya dan tradisi daerah, yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi alat promosi daerah sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah. Adapun gambaran umum pembangunan dalam aspek seni budaya dan olah raga adalah

- a. Jumlah seniman sebanyak 66 orang, jumlah organisasi kesenian sebanyak 69 organisasi, 6 lokasi batu megalith, 11 lokasi rekreasi, 54 rumah adat dan 3 situs budaya.
- b. Jumlah wisatawan yang datang di Kota Gunungsitoli pada tahun 2009 sebanyak 22.749 wisatawan, yang terdiri dari wisatawan asing sebanyak 151 orang dan wisatawan domestik sebanyak 22.598 orang.

- c. Penduduk Kota Gunungsitoli berdasarkan pemeluk agama terdiri dari Islam sebanyak 16.690 orang, Kristen Protestan sebanyak 109.156 orang, Kristen Katolik sebanyak 15.414 orang, dan Budha sebanyak 134 orang.
- d. Jenis olah raga yang populer dan digemari oleh sebagian besar masyarakat Kota Gunungsitoli antara lain, bola voli, sepak bola, dan bulu tangkis.

2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

2.3.1.1 Pendidikan

Kondisi pembangunan sub sektor pendidikan dasar dan menengah dalam kaitannya dengan aspek pelayanan umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator sebagai berikut :

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar di Kota Gunungsitoli pada tahun 2010 sebesar 994,69 per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sementara untuk jenjang pendidikan menengah sebesar 610,33 per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya serap pelayanan sistem pendidikan dasar di Kota Gunungsitoli relatif lebih baik, sementara untuk jenjang pendidikan menengah relatif lebih rendah sehingga pada masa mendatang dibutuhkan peningkatan pelayanan pendidikan bagi potensi jumlah penduduk usia pendidikan menengah dimaksud. Keadaan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Gunungsitoli tahun 2010 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9
Keadaan Angka Partisipasi Murni Sekolah (APS) Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Jenjang Pendidikan	2010
1	2	3
1	Pendidikan Dasar	
1.1.	jumlah siswa kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan Dasar	26.028

No	Jenjang Pendidikan	2010
1	2	3
1.2.	jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun	26.167
1.3.	APS Pendidikan Dasar Per 1.000 Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar	994,69
2	Pendidikan Menengah	
2.1.	jumlah siswa kelompok usia 16-18 tahun yang bersekolah di jenjang pendidikan menengah	4.951
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 16-18 tahun	8.112
2.3.	APS Pendidikan Menengah Per 1.000 Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah	610,33

Sumber :Gunungsitoli Dalam Angka 2011

2. Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap Penduduk Usia Sekolah.

Pada tahun 2010 di Kota Gunungsitoli jumlah gedung sekolah SD/MI sebanyak 104 unit dan SMP/MTs sebanyak 23 unit, sehingga rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah yaitu SD/MI sebesar 59,62 per 10.000 jumlah penduduk usia 7-12 tahun dan SMP/MTs sebesar 34,39 per 10.000 jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Untuk tingkat SMU/SMK/MA jumlah gedung sekolah sebanyak 26 unit dengan rasio ketersediaan sekolah sebesar 32,05 per 10.000 jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi rasio ketersediaan sekolah di Kota Gunungsitoli tahun 2010 menunjukkan besarnya potensi penduduk usia sekolah di semua jenjang pendidikan, yang belum terlayani oleh sarana dan prasarana sekolah. Besarnya potensi penduduk usia sekolah di Kota Gunungsitoli, mengindikasikan perlunya peningkatan sarana dan prasarana sekolah yang lebih memadai dan merata di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.10
Ketersediaan sekolah dan penduduk usia sekolah Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Jenjang Pendidikan	2010
1	SD/MI	
1.1.	Jumlah gedung sekolah	104
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun	17.444
1.3.	Rasio	59,62
2	SMP/MTs	
2.1.	Jumlah gedung sekolah	30
2.2.	jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	8.723
2.3.	Rasio	34,39
3	SMU/SMK/MA	
3.1	Jumlah Gedung Sekolah	26
3.2	Jumlah Penduduk Kelompok Usia 16-18 Tahun	8.112
3.3	Rasio	32,05

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Gunungsitoli

3. Rasio guru terhadap murid.

Pada tahun 2010 rasio guru terhadap murid untuk SD/MI sebesar 554,67 per 10.000 murid, sementara rasio guru terhadap murid untuk SMP/MTs sebesar 432,90 per 10.000 murid. Secara umum, rasio guru terhadap murid pendidikan dasar sebesar 521,26 per 10.000 jumlah murid pendidikan dasar.

Untuk pendidikan menengah rasio guru terhadap murid sebesar 583,27 per 10.000 jumlah murid pendidikan menengah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebutuhan guru di Kota Gunungsitoli pada semua jenjang pendidikan harus lebih ditingkatkan baik dari aspek kualitas maupun kuantitas serta pemerataan guru disemua unit pelayanan pendidikan.

Tabel 2.11
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun
2010 Kota Gunungsitoli

No	Jenjang Pendidikan	2010
1	SD/MI	
1.1.	Jumlah Guru	1.152
1.2.	Jumlah Murid	20.769
1.3.	Rasio	554,67
2	SMP/MTs	
2.1.	Jumlah Guru	340
2.2.	Jumlah Murid	7.854
2.3.	Rasio	432,90
3	Jumlah Guru Pendidikan Dasar	1.492
3.1	Jumlah Murid Pendidikan Dasar	28.623
3.2	Rasio	521,26
3	SMU/SMK/MA	
3.1	Jumlah Guru	304
3.2	Jumlah Murid	5.212
3.3	Rasio	583,27

Sumber : Gunungsitoli Dalam Angka 2010

2.3.1.2 Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan dalam kaitannya dengan aspek pelayanan umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator berikut ini :

a. Rasio Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Per Satuan Balita

Pada tahun 2010 di Kota Gunungsitoli jumlah posyandu sebanyak 149 unit sedangkan jumlah balita sebanyak 12.620 balita, dengan rasio sebesar 1,18 per 100 balita. Rasio Pos Pelayanan Terpadu per satuan balita ini menunjukkan bahwa keberadaan posyandu di Kota Gunungsitoli sudah melebihi kondisi ideal pelayanan sebuah posyandu yakni 1 : 100 balita. Kondisi keberadaan posyandu di Kota Gunungsitoli pada masa mendatang harus dapat dimaknai melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan bagi balita.

b. Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Pada tahun 2010 di Kota Gunungsitoli jumlah puskesmas sebanyak 4 unit, , puskesmas pembantu sebanyak 18 unit. Rasio puskesmas sebesar 0,03 per 1.000 penduduk dan rasio puskesmas pembantu sebesar 0,14 per 1.000 penduduk. Untuk wilayah kecamatan yang memiliki puskesmas rasio tertinggi di Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan rasio puskesmas sebesar 0,15 per 1.000 penduduk, sementara rasio terendah di kecamatan Gunungsitoli Idanoi sebesar 0,05 per 1.000 penduduk. Rasio puskesmas pembantu tertinggi berada di Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebesar 0,44 per 1.000 penduduk sedangkan rasio terendah berada di Kecamatan Gunungsitoli 0,07 per 1.000 penduduk. Kondisi rasio puskesmas dan puskesmas pembantu di wilayah Kota Gunungsitoli, menunjukkan belum optimalnya pelayanan sarana dan prasarana kesehatan yang merata di seluruh wilayah kecamatan. Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana kesehatan relatif sangat terbatas, sehingga berdampak terhadap pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.

c. Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk

Di wilayah Kota Gunungsitoli terdapat satu unit rumah sakit tipe "C" yang pengelolaannya masih Pemerintah Kabupaten Nias sebagai daerah induk pemekaran dari pada Kota Gunungsitoli. Keberadaan Rumah Sakit Umum Gunungsitoli merupakan infrastruktur strategis di bidang kesehatan, yang cakupan pelayanannya meliputi seluruh masyarakat Kepulauan Nias. Kondisi bangunan dengan segala peralatan medis yang relatif memadai, yang dibangun atas bantuan pemerintah Malaysia dan Cina pada masa rehabilitasi dan rekonstruksi NAD-Nias pasca bencana gempa bumi, hingga saat ini belum dimanfaatkan secara optimal mengingat keterbatasan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Pada masa mendatang RSUD Gunungsitoli diharapkan akan menjadi salah satu alternatif pusat pelayanan kesehatan berkualitas di Kepulauan Nias maupun wilayah pantai barat pulau Sumatera.

Tabel 2.12
Jumlah dan Rasio Rumah Sakit Per jumlah Penduduk
Tahun 2009 s.d 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2009	2010
1.	Jumlah Rumah Sakit Umum (Pemerintah)	1	1
2.	Jumlah Rumah Sakit Jiwa/Paru dan penyakit khusus lainnya milik pemerintah	0	0
3.	Jumlah Rumah Sakit AD/AU/AL/POLRI	0	0
4.	Jumlah Rumah Sakit Daerah	0	0
5.	Jumlah seluruh Rumah Sakit	1	1
6.	Jumlah Penduduk	104.260	126.202
7.	Rasio	0,010	0,008

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

d. Rasio Dokter Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2009 di Kota Gunungsitoli terdapat jumlah Dokter sebanyak 2 orang dengan rasio sebesar 0,01 per 1.000 penduduk. Untuk tahun 2010 meningkat menjadi 5 orang dengan rasio sebesar 0,04 per 1.000 penduduk 4 (empat) dari 5 (lima) jumlah dokter tersebut berada di Kecamatan Gunungsitoli dan 1 (satu) orang di Kecamatan Gunungsitoli Selatan. Kondisi keberadaan dokter di wilayah Kota Gunungsitoli relatif sangat terbatas bila dibandingkan dengan cakupan wilayah pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Pada masa mendatang keberadaan dokter di unit-unit pelayanan kesehatan akan semakin ditingkatkan, sehingga masyarakat akan mudah mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau.

Tabel 2.13
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Dokter	Rasio
(1)	(2)	(3)	(4)	(5=4/3)
1	Gunungsitoli Idanoi	21.482	0	0
2	Gunungsitoli Selatan	13.739	1	0,07
3	Gunungsitoli Barat	7.436	0	0,00
4	Gunungsitoli	60.625	4	0,07
5	Gunungsitoli Alo'oa	6.708	0	0,00
6	Gunungsitoli Utara	16.212	0	0,00
	Jumlah	126.202	5	0,04

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Pada tahun 2009 di Kota Gunungsitoli jumlah tenaga medis sebanyak 151 orang dengan rasio sebesar 1,45 per 1.000 penduduk, sedangkan tahun 2010 bertambah menjadi 190 orang dengan rasio sebesar 1,51 per 1.000 penduduk. Jumlah tenaga medis terbanyak berada di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Selatan sebanyak 66 orang dengan rasio sebesar 4,80 per 1.000 penduduk sementara yang terendah di wilayah Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan jumlah 4 orang atau rasio 0,60 per 1.000 penduduk. Kebutuhan tenaga medis di Kota Gunungsitoli khususnya tenaga para medis sangat penting dan mendesak, bercermin dari kondisi pelayanan kesehatan dewasa ini. Peningkatan tenaga para medis ini selain dari aspek kualitas maupun kuantitas, juga pada aspek pemerataan tenaga para medis di unit-unit pelayanan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.14
Jumlah Tenaga Medis Tahun 2009 s.d 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2009	2010
1	Jumlah Tenaga Medis	151	190
2	Jumlah Penduduk	104.260	126.202
3	Rasio	1,45	1,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

Tabel 2.15
Jumlah Tenaga Medis Menurut Kecamatan Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Tenaga Medis	Rasio
1	Gunungsitoli Idanoi	21.482	24	1,12
2	Gunungsitoli Selatan	13.739	66	4,80
3	Gunungsitoli Barat	7.436	8	1,08
4	Gunungsitoli	60.625	58	0,96
5	Gunungsitoli Alo'oa	6.708	4	0,60
6	Gunungsitoli Utara	16.212	30	1,85
	Jumlah	126.202	190	1,51

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

2.3.1.3 Lingkungan Hidup

Kondisi pembangunan sektor lingkungan hidup di Kota Gunungsitoli tahun 2010 meliputi penanganan persampahan, akses air minum dan penguasaan tempat tinggal, dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, dapat digambarkan melalui beberapa indikator di bawah ini :

a. Penanganan Sampah

Pada tahun 2010 volume sampah di Kota Gunungsitoli sebesar 28.800 M³ dengan jumlah tertangani sebanyak 25.200 M³ atau

87,5 %. Penanganan sampah di wilayah Kota Gunungsitoli pada hakekatnya relatif sudah terlaksana dengan baik namun pada masa mendatang harus lebih optimal untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik bagi kesejahteraan masyarakat, layaknya sebuah wilayah perkotaan pada umumnya. Penanganan persampahan di Kota Gunungsitoli pada masa mendatang harus bersifat terpadu dan senantiasa mempertimbangkan aspek sosiologi masyarakat serta aspek infrastruktur persampahan mulai dari sarana pengangkutan sampai kepada pengolahan di tempat pembuangan akhir.

e. Akses Air Minum

Berdasarkan hasil sensus nasional 2010 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias menunjukkan bahwa sumber air minum masyarakat Kota Gunungsitoli berasal dari sumur tak terlindungi sebesar 22,67 persen, mata air tak terlindungi 22,14 persen, leding meteran 14,37 persen, sumur terlindungi 13,58 persen, dsb. Kondisi ini menggambarkan kurang lebih 50 % masyarakat Kota Gunungsitoli memiliki akses air minum dengan kualitas yang sangat rendah, sehingga berdampak pada kualitas kesehatan masyarakat.

f. Penguasaan Tempat Tinggal

Hasil Susenas 2010 oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias menunjukkan bahwa penguasaan tempat tinggal masyarakat Kota Gunungsitoli merupakan milik sendiri sebesar 76,20 persen, milik orangtua/keluarga sebesar 12,58 persen, kontrak 5,79 persen, sewa 2,17 persen, dsb. Penguasaan tempat tinggal di Kota Gunungsitoli yang sebagian besar merupakan milik sendiri, diharapkan akan menimbulkan perasaan memiliki terhadap penataan lingkungan yang lebih berkualitas.

2.3.1.4 Sarana dan Prasarana Umum

Kondisi pembangunan sarana dan prasarana umum di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator berikut ini :

a. Panjang Jaringan Jalan

Pada tahun 2010 panjang jaringan jalan di Kota Gunungsitoli sepanjang 434,766 km yang terdiri dari Jalan Provinsi sepanjang 57,61 km, Jalan Kabupaten sepanjang 221,72 km, Jalan Desa sepanjang 98,416 km, dan Jalan Kota sepanjang 57,02 km. Secara umum sebagian besar wilayah Kota Gunungsitoli memiliki jaringan jalan yang relatif memadai. Namun beberapa wilayah yang menghubungkan ibu kota kecamatan dengan desa serta sentra-sentra produksi masyarakat belum memiliki akses jalan yang memadai.

Dari 434,76 km panjang jaringan jalan di Kota Gunungsitoli 76,11 km berada di kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Gunungsitoli Selatan 66,96 km, Gunungsitoli Barat 33,09 km, Gunungsitoli 154,11 km, Gunungsitoli Alo'oa 37,58 km dan Gunungsitoli Utara 66,90 km.

b. Rasio Jaringan Irigasi

Pada tahun 2010 panjang jaringan irigasi primer di Kota Gunungsitoli sepanjang 621 m, dengan luas lahan budidaya yang dilayani sebesar 713 Ha. Rasio panjang jaringan irigasi dengan luas lahan budi daya yang dilayani sebesar 0,87. Kondisi jaringan irigasi di Kota Gunungsitoli relatif belum berfungsi dengan optimal. Beberapa daerah irigasi lainnya di sentra-sentra produksi pertanian tanaman pangan sudah tidak berfungsi lagi, sehingga sangat berdampak kepada kemampuan produksi masyarakat.

c. Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk

Pada tahun 2010 rasio tempat ibadah di Kota Gunungsitoli yaitu sebesar 3,39 per 1.000 penduduk, yang terdiri dari mesjid sebesar 3,51 per 1.000 penduduk, gereja sebesar 3,48 per 1.000 penduduk, vihara sebesar 3,24 per 1.000 penduduk.

Tabel 2.16
Rasio Tempat Ibadah Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Bangunan tempat Ibadah	Tahun 2010		
		Jumlah (unit)	Jumlah pemeluk	Rasio
1.	Mesjid	59	16.778	3,51
2.	Gereja	395	113.256	3,48
3.	Pura	0	18	0
4.	Vihara	1	308	3,24
5.	Kelenteng	0	0	0
6.	Lain-Lain	0	12	0
	Jumlah	443	130.372	3,39

Sumber : BPS Kabupaten Nias

d. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Pada tahun 2010 rasio daya tampung Tempat Pembuangan Sampah (TPS) terhadap jumlah penduduk di Kota Gunungsitoli sebesar 0,02 persen. Sedangkan jumlah TPS sebanyak 4 unit dengan jumlah daya tampung sebesar 3 ton. Kondisi tempat pembuangan sampah di Kota Gunungsitoli secara umum relatif sudah memadai, namun pada masa mendatang perlu lebih dioptimalkan mengingat volume sampah yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

2.3.1.5 Penataan Ruang

Kondisi pembangunan Penataan Ruang di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum dapat digambarkan melalui beberapa indikator berikut ini :

a. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Pada tahun 2010 luas ruang terbuka hijau di Kota Gunungsitoli seluas 4,8 dengan luas wilayah ber HPL/HGB seluas 18.107. Rasio ruang terbuka hijau di Kota Gunungsitoli sebesar 0,03, terdiri dari 1,40 di wilayah Kecamatan Gunungsitoli dan Kecamatan Gunungsitoli Barat sebesar 0,06.

Tabel 2.17
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2010
1.	Luas Ruang Terbuka Hijau	4,8
2.	Luas wilayah ber HPL/HGB	18,107
3.	Luas wilayah	46,936
4.	Rasio Ruang Terbuka Hijau (1:2)	0,03

Sumber : Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Kebersihan Kota Gunungsitoli

2.3.1.6 Perhubungan

Kondisi pembangunan sektor perhubungan di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, meliputi beberapa indikator antara lain :

a. Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Pada tahun 2010 jumlah penumpang angkutan umum di Kota Gunungsitoli sebanyak 314.523 orang yang terdiri dari penumpang bis sebanyak 62.766 orang, kapal laut, sebanyak 151.477 orang, dan pesawat udara sebanyak 100.280 orang. Kondisi peningkatan arus penumpang angkutan umum di Kota Gunungsitoli, pada hakekatnya merupakan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Berbagai kebijakan pada masa mendatang diharapkan, mampu meningkatkan citra Kota Gunungsitoli sebagai pusat kegiatan jasa dan perdagangan, yang nyaman untuk dikunjungi dan melakukan aktivitas bisnis.

Tabel 2.18
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2010
1.	Jumlah penumpang Bis	62.766
2.	Jumlah penumpang Kereta api	0
3.	Jumlah penumpang Kapal laut	151.477
4.	Jumlah penumpang Pesawat udara	100.280
5.	Total Jumlah Penumpang	314.523

Sumber : * Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli

** Kantor Pelabuhan Udara Binaka

*** Adpel Gunungsitoli

b. Rasio Ijin Trayek

Pada tahun 2010 jumlah izin trayek di Kota Gunungsitoli sebanyak 22 izin trayek. Kondisi pengelolaan izin trayek Kota Gunungsitoli belum terlaksana secara optimal. Hal ini disebabkan Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru, memiliki berbagai keterbatasan baik dari aspek kelembagaan maupun aspek regulasi. Disamping itu beberapa hal menyangkut pengelolaan izin trayek ini, masih seringkali tumpang tindih kewenangan dengan kabupaten induk.

c. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis

Kota Gunungsitoli memiliki infrastruktur strategis di bidang perhubungan, antara lain : pelabuhan laut sebanyak 1 buah dengan panjang dermaga 86 meter, lebar 20 meter, dengan kedalaman laut 100 meter. Pelabuhan udara sebanyak 1 buah dengan panjang run way berstruktur aspal hot mix berdimensi 1.800 m x 30 m, dan terminal bus sebanyak 2 buah. Keberadaan infrastruktur strategis ini, merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing daerah. Kondisi infrastruktur pelabuhan laut dan udara pada masa mendatang harus lebih ditingkatkan kapasitas maupun kualitas pelayanannya, sehingga mampu menjadi lokomotif perekonomian daerah khususnya di sektor jasa, perdagangan dan industri.

2.4.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

2.4.2.1 Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM)

Kondisi pembangunan sektor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, meliputi beberapa indikator antara lain :

a. Persentase Koperasi Aktif

Pada tahun 2010 jumlah koperasi aktif di Kota Gunungsitoli sebesar 53,6% dari 192 unit koperasi. Koperasi merupakan salah satu badan usaha yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan. Permasalahan pembangunan koperasi di Kota Gunungsitoli pada umumnya adalah lemahnya kelembagaan

usaha koperasi terutama pada akses permodalan dan jaringan kemitraan usaha. Keberadaan lembaga usaha Koperasi di Kota Gunungsitoli pada masa mendatang, harus memiliki daya saing dalam khasanah perekonomian daerah melalui sejumlah kebijakan pemberdayaan koperasi. Kelembagaan usaha koperasi yang efektif dan efisien secara bertahap diharapkan akan mendapat kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola aktivitas produksinya.

b. Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM

Pada tahun 2009 di Kota Gunungsitoli jumlah seluruh UKM sebanyak 360 unit, yang meliputi berbagai sektor perekonomian daerah. Kondisi kelembagaan usaha UKM di Kota Gunungsitoli secara umum diperhadapkan kepada akses permodalan yang reaktif sangat terbatas serta pengelolaan yang masih sangat sederhana (umumnya bersifat usaha pribadi/perorangan). Pemerintah daerah selaku regulator, pada masa mendatang seyogyanya mendorong percepatan peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku usaha, sehingga secara bertahap mampu memberikan nilai tambah bagi peningkatan daya saing perekonomian daerah.

2.4.2.2 Kependudukan

Kondisi pembangunan sektor kependudukan di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, meliputi beberapa indikator antara lain :

a. Pertumbuhan Penduduk

Pada tahun 2010 angka kelahiran kasar (CBR) di Kota Gunungsitoli sebesar 19,7 per 1.000 penduduk, angka kematian kasar (CDR) sebesar 0,3 per 1.000 penduduk, sedangkan angka kematian bayi (IMR) sebesar 0,17 per 1.000 penduduk. Kondisi angka kelahiran kasar yang relatif tinggi secara umum mengindikasikan besarnya beban tanggungan pembangunan. Tingkat kelahiran kasar secara moderat pada masa mendatang seyogyanya harus berbanding lurus dengan kondisi kesejahteraan

masyarakat sebagai dampak keberhasilan pembangunan. Demikian juga kondisi derajat kesehatan masyarakat yang semakin baik diharapkan mampu menurunkan angka kematian kasar maupun angka kematian bayi.

Tabel 2.19
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Gunungsitoli Tahun 2010

No	Fertilitas/mortalitas	Jumlah
1	Angka kelahiran kasar (CBR)	19,7
2	Angka kematian kasar (CDR)	0,38
3	Angka kematian bayi (IMR)	56

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Gunungsitoli

b. Pengelompokan Penduduk

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2010 jumlah penduduk Kota Gunungsitoli tahun 2010 berjumlah 126.202 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut yang paling banyak jumlah penduduk pada kelompok umur 0-4 tahun berjumlah 15.437 jiwa dan kelompok umur 5-9 tahun berjumlah 15.197 jiwa. Sedangkan yang paling sedikit pada kelompok umur 70-74 tahun berjumlah 1.015 jiwa dan kelompok umur >75 tahun berjumlah 1.139 jiwa.

Berdasarkan hasil Sensus Ekonomi Nasional 2010, jumlah penduduk 10 tahun Keatas menurut pendidikan tertinggi di Kota Gunungsitoli berjumlah 95.568 jiwa, yang terbanyak jenis kelamin laki-laki berjumlah 48.974 jiwa, sedangkan perempuan berjumlah 46.594 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut persentase pendidikan yang ditamatkan yaitu tidak punya ijazah SD sebesar 25,51 persen, SD/MI sederajat sebesar 24,97 persen, SMP sebesar 19,92 persen, SMA sebesar 21,67 persen dan Perguruan tinggi sebesar 7,92 persen. Dari total jumlah penduduk Kota Gunungsitoli, penduduk dengan jenis kelamin perempuan berjumlah 64.363 jiwa, sementara laki-laki berjumlah 61.839 jiwa dengan rasio jenis kelamin 96,07. Jumlah penduduk per kecamatan yang paling banyak di Kecamatan Gunungsitoli dengan jumlah 60.625 jiwa dan paling sedikit penduduk Kecamatan Gunungsitoli Alo'oa dengan jumlah 6.708 jiwa.

2.4.2.3 Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Kondisi pembangunan sektor keluarga berencana di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, dapat digambarkan antara lain : Jumlah akseptor KB pada tahun 2010 sebanyak 12.596, Jumlah Pasangan Usia Subur sebanyak 17.573, sehingga rasio akseptor KB di Kota Gunungsitoli sebesar 71,68 persen. Kondisi kesejahteraan keluarga yang semakin baik di Kota Gunungsitoli, diharapkan akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat pentingnya keluarga berencana sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk mewujudkan keluarga sejahtera secara berkelanjutan.

2.4.2.4 Komunikasi dan Informasi

Kondisi pembangunan sektor komunikasi dan informasi di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, meliputi beberapa indikator antara lain :

a. Jumlah Jaringan Komunikasi

Pada tahun 2010 jumlah jaringan komunikasi di Kota Gunungsitoli sebanyak 2.275 unit, terdiri dari jaringan telepon genggam sebanyak 18 unit, telepon stasioner sebanyak 2.257 unit. Sarana komunikasi pada era informasi yang semakin mengglobal dewasa ini, merupakan hal penting dan strategis yang perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Pada masa mendatang pemerintah daerah perlu merancang kebutuhan kapasitas jaringan komunikasi dalam upaya mempercepat daya saing perekonomian daerah. Kota Gunungsitoli yang diharapkan kelak sebagai pusat jasa, perdagangan dan industri harus didukung oleh sarana jaringan komunikasi yang memadai.

b. Rasio Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Pada tahun 2010 rasio jumlah wartel di Kota Gunungsitoli sebesar 0,01 per 1.000 penduduk dan rasio warnet sebesar 0,24 per 1.000 penduduk. Rasio menurut kecamatan yaitu di Kecamatan Gunungsitoli dengan rasio wartel 0,02, dan rasio warnet 0,46 sementara Kecamatan Gunungsitoli Selatan rasio warnet sebesar 0,15. Warung Internet di Kota Gunungsitoli dewasa ini mengalami

pertumbuhan yang signifikan. Warnet bukan lagi sekedar tempat hiburan maupun sebagai arena permainan biasa. Namun kini keberadaan warnet merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam berbagai siklus aspek kehidupan masyarakat.

c. Jumlah Penyiaran Radio/Tv Lokal

Pada tahun 2010 total penyiaran radio/TV lokal di Kota Gunungsitoli sebanyak 2 kali, terdiri dari penyiaran radio lokal dan radio nasional. Keberadaan stasiun RRI cabang Gunungsitoli dewasa ini pada hakekatnya merupakan salah satu nilai tambah Kota Gunungsitoli layaknya sebuah kota pada umumnya. RRI cabang Gunungsitoli selain sebagai lembaga penyiaran publik, juga diharapkan memegang peranan dalam menyebarkan berbagai informasi pembangunan. Disamping itu RRI cabang Gunungsitoli, dapat menjadi mitra bisnis bagi pelaku usaha di Kota Gunungsitoli. Pada Masa mendatang RRI cabang Gunungsitoli akan lebih meningkatkan kuantitas maupun kualitas layanan penyiaran publik.

2.4.2.5 Pertanahan

Kondisi pembangunan sektor pertanahan di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, dapat dilihat melalui indikator antara lain :

a. Persentase Luas Lahan Bersertifikat

Pada tahun 2009 luas lahan bersertifikat di Kota Gunungsitoli yaitu HGB sebanyak 16.129, HM sebanyak 546.641. Untuk tahun 2010 HGB sebanyak 104 dan HM sebanyak 695.238. Kebutuhan akan lahan bersertifikat dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru, seyogyanya memanfaatkan momentum ini untuk menata aset-aset pemerintah daerah sejak dini sehingga kelak tidak menimbulkan permasalahan. Ketersediaan lahan yang dari waktu ke waktu semakin terbatas, dapat menjadi potensi konflik sosial bagi masyarakat jika lahan yang dimiliki tidak memiliki dokumen pertanahan yang berkekuatan hukum.

2.4.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa

Kondisi pembangunan sektor pemberdayaan masyarakat dan desa di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, meliputi beberapa indikator antara lain :

a. Kelompok Binaan LPM

Pada tahun 2010 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) secara kelembagaan telah terbentuk di 101 desa/kelurahan wilayah Kota Gunungsitoli. Namun demikian kondisi ini sangat ironis bila dicermati peran dan fungsi LPM yang dilaksanakan selama ini. Secara umum keberadaan LPM di Kota Gunungsitoli belum mencerminkan sebuah lembaga aspiratif yang berfungsi sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Pada masa mendatang, pemerintah daerah perlu memformulasikan metode pemberdayaan LPM yang sesuai dengan ciri khas dan karakteristik daerah, sehingga peran dan fungsi LPM dapat lebih optimal sesuai harapan seluruh masyarakat.

b. Rata-Rata Jumlah Kelompok Binaan PKK

Pada tahun 2010 program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kota Gunungsitoli telah ada di 101 desa/kelurahan. Dari jumlah tersebut kelompok yang telah dibina sebanyak 12 kelompok atau sebesar 0,11%. Kelompok binaan PKK adalah kelompok-kelompok masyarakat yang berada dibawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan, yang berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK. Keberadaan PKK di Kota Gunungsitoli secara umum belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan keberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Peran strategis PKK sebagai lembaga yang secara struktural memiliki kedekatan dengan masyarakat, pada masa mendatang harus dapat lebih dioptimalkan peran dan fungsinya dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan.

c. Jumlah LSM Yang Aktif

Pada tahun 2009 jumlah LSM aktif yang ada di Kota Gunungsitoli sebanyak 3 lembaga dan tahun 2010 sebanyak 16 lembaga. Dewasa ini keberadaan LSM sebagai lembaga penyeimbang sekaligus kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah, membawa dampak yang besar bagi perkembangan dinamika kehidupan bermasyarakat di Kota Gunungsitoli. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel, seyogyanya semakin memberi ruang bagi LSM untuk mengimplementasikan peran dan fungsinya dalam mewujudkan kebijakan pembangunan yang memihak kepada kepentingan masyarakat.

2.4.2.7 Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kondisi penyelenggaraan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek kesejahteraan umum, dapat dilihat melalui indikator antara lain :

a. Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Pada tahun 2009 jumlah Polisi Pamong Praja di Kota Gunungsitoli sebanyak 18 orang atau 1,72 per 10.000 penduduk dan tahun 2010 bertambah menjadi 27 orang atau 2,14 per 10.000 penduduk. Pendekatan keamanan dalam Penyelenggaraan ketertiban umum, pada masa mendatang secara bertahap tidak bertumpu pada jumlah personil satuan polisi pamong praja yang tersedia. Namun demikian, seiring peningkatan kesejahteraan masyarakat diharapkan akan menumbuhkan semangat kemandirian dan keswadayaan masyarakat untuk menyelenggarakan ketertiban umum yang kondusif.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah

Gambaran kondisi kemampuan ekonomi daerah Kota Gunungsitoli dalam kaitannya dengan aspek daya saing daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini :

a. Produktivitas Total Daerah

Struktur ekonomi Kota Gunungsitoli kurun waktu 2008-2010 didominasi sektor perdagangan, hotel dan restoran. Bahkan hingga

tahun 2010 sektor-sektor tersebut cenderung mengalami penguatan peran dalam struktur ekonomi daerah. Sampai dengan tahun 2010, komposisi perekonomian Kota Gunungsitoli tidak banyak berubah. Sektor-sektor yang mendominasi perekonomian yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 35 persen, sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 16,29 persen, sektor bangunan sebesar 13,41 serta sektor keuangan sebesar 10,86 persen.

Tabel 2.20
Struktur Perekonomian Kota Gunungsitoli 2008-2010

No	Lapangan Usaha	Kontribusi Sektor		
		2008	2009	2010
01.	Pertanian	13,47	12,41	12,64
02.	Pertambangan dan Penggalian	0,37	0,33	0,32
03.	Industri Pengolahan	2,69	2,81	2,87
04.	Listrik, Gas dan Air Bersih	0,52	0,51	0,48
05.	Bangunan	13,69	12,84	13,41
06.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	34,06	36,28	35,00
07.	Pengangkutan dan Komunikasi	16,00	16,11	16,29
08.	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	10,47	10,54	10,86
09.	Jasa-jasa	8,74	8,17	8,13
	Seluruh Sektor	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Sektor pertambangan dan penggalian stagnan sepanjang tahun 2008-2010. Sektor ini merupakan sektor yang paling kecil perannya terhadap struktur perekonomian daerah. Sementara sektor pengangkutan dan komunikasi mengalami penguatan peran. Tahun 2008 kontribusi sektor ini sebesar 16.00 persen menjadi 16,29 persen tahun 2010.

Secara rata-rata selama periode 2008-2010, sektor perdagangan, hotel dan restoran merupakan sektor yang paling dominan

menyerap investasi di Kota Gunungsitoli. Nilai investasi yang ditanamkan di sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 73,62 persen dari rata-rata total investasi sepanjang periode 2008-2010. Sektor bangunan berada pada urutan kedua, dengan investasi yang ditanamkan sebesar 9,78 persen. Di urutan ketiga adalah investasi yang ditanamkan di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 6,81 persen. Selain itu lapangan usaha yang memiliki nilai investasi yang tinggi adalah sektor pertanian sebesar 6,41 persen. Sementara lima lapangan usaha lainnya memiliki nilai investasi di bawah lima persen.

Tabel 2.21

**Distribusi Investasi Kota Gunungsitoli Tahun 2008-2010
Atas Dasar Harga Konstan 2000 (juta rupiah)**

NO	Lapangan Usaha/Sektor Ekonomi	2008		2010		Rata-rata Investasi Pertahun selama 2008-2010	
		Nilai	%	Nilai	%	Nilai	%
01.	Pertanian	10.263,09	4,04	24.023,90	8,55	17.143,49	6,41
02.	Pertambangan & Penggalian	9,25	0,00	8,47	0,00	8,86	0,00
03.	Industri Pengolahan	543,49	0,21	555,21	0,20	549,35	0,21
04.	Listrik, Gas dan Air Bersih	16,07	0,01	17,64	0,01	16,85	0,01
05.	Bangunan	23.660,74	9,31	28.669,83	10,21	26.165,29	9,78
06.	Perdagangan, Hotel & Restoran	195.846,57	77,10	197.968,14	70,48	196.907,35	73,62
07.	Pengangkutan & Komunikasi	15.459,76	6,09	20.976,10	7,47	18.217,93	6,81
08.	Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1.621,93	0,64	1.804,90	0,64	1.713,42	0,64
09.	Jasa-jasa	6.596,90	2,60	6.875,59	2,45	6.736,25	2,52
	Seluruh Sektor	254.017,81	100	280.899,78	100	267.458,80	100

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Pada periode 2008-2010 besarnya ICOR Kota Gunungsitoli dengan menggunakan metode akumulasi dan *time lag 0* tahun (lag 0) rata-rata dengan 7,03 sedangkan dengan metode standar nilai ICOR sebesar 4,80. Hal ini disebabkan terjadinya peningkatan output yang cukup besar pada periode tersebut. Pada lag 1 koefisien ICOR semakin mengecil, demikian juga pada lag 2, Hal ini mengindikasikan bahwa nilai investasi saat itu akan semakin efisien seiring makin berjalannya waktu.

Untuk ICOR lag 2 diperkirakan memiliki koefisien sebesar 6,97. Besaran ini menunjukkan bahwa investasi yang ditanamkan di tahun 2008 belum efektif. Untuk itu di perlukan waktu agar investasi tersebut mencapai output yang optimal. Hal ini disebabkan sifat investasi atau barang modal yang memerlukan proses dalam penciptaan output.

Tabel 2.22
Koefisien ICOR Kota Gunungsitoli Tahun 2008-2010

Tahun	Koefisien ICOR		
	Lag 0	Lag 1	Lag 2
2008	4,79	4,67	4,15
2009	4,86	4,75	
2010	5,04		
Rata-Rata :			
Metode Akumulasi	7,03	6,97	6,70
Metode Standar	4,80	4,59	4,20

Sumber : BPS Kabupaten Nias

Berdasarkan hasil tabel di atas, jika dilihat nilai ICOR pada lag 2 atau dua tahun kedepan maka diperoleh koefisien sebesar 6,70. Angka ini menunjukkan investasi yang sedikit lebih efisien dibanding lag sebelumnya. Berarti investasi yang ditanamkan sudah mulai menunjukkan peningkatan output, walaupun belum optimal.

Apabila dilihat besaran ICOR di atas maka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Kota Gunungsitoli cukup stabil dan investasi berjalan dengan baik sebagai daerah otonom baru.

b. Nilai Tukar Petani

Pada tahun 2009 Nilai Tukar Petani (NTP) di Kota Gunungsitoli sebesar 103,88 dan tahun 2010 sebesar 92,60 dari indeks yang diterima dan yang dibayar petani.

Tabel 2.23
Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2009 s.d 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2009	2010
1.	Indeks yang diterima petani (It)	1.605.000	1.347.333
2.	Indeks yang dibayar petani (Ib)	1.545.000	1.455.000
3.	NTP	103,88	92,60

Sumber : Dinas Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan Kota Gunungsitoli

2.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Kondisi pembangunan fasilitas wilayah/Infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas daerah dalam kaitannya dengan aspek daya saing daerah dapat dilihat melalui beberapa indikator berikut ini :

a. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Pada tahun 2010 panjang jalan di Kota Gunungsitoli sebanyak 434,76 km, dengan jumlah kendaraan sebanyak 5.321 unit. Adapun rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Gunungsitoli adalah 0,082.

Tabel 2.24
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Tahun 2010
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2010
1.	Panjang Jalan	434,76
2.	Jumlah Kendaraan	5.321**
3.	Rasio	0,082

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Gunungsitoli

** Angka Sangat Sementara

b. Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Pada tahun 2010 jumlah orang yang terangkut angkutan umum di Kota Gunungsitoli sebanyak 314.523 orang, sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 40.019.111 ton.

Tabel 2.24
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun
2010 Kota Gunungsitoli

No	Uraian	Satuan	2010
1.	Jumlah orang	Orang	314.523
2.	Jumlah Barang	Ton	40.019.111

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli

2.4.3 Fasilitas Bank Dan Non Bank

Gambaran ketersediaan fasilitas perbankan dan non bank di Kota Gunungsitoli tahun 2010 dapat dilihat pada indikator berikut :

a. Jenis Dan Jumlah Bank

Jenis dan jumlah Bank di Kota Gunungsitoli sebanyak 8 unit terdiri dari Bank Sumut, BNI, BRI, Bank Danamon, BTPN dan Bank Danamon Mikro.

Tabel 2.25
Jenis dan Jumlah Bank Kota Gunungsitoli Tahun 2010

No	Sektor	2010
1.	Bank Umum	
1.1.	Konvensional	8
1.2.	Syariah	0
2.	BPR	
2.1.	Konvensional	0
2.2.	Syariah	0
Jumlah		8

2.4.4 Ketersediaan Air Bersih

Kondisi ketersediaan air bersih di Kota Gunungsitoli tahun 2010 dalam kaitan dengan aspek kesejahteraan umum dapat dilihat melalui indikator berikut ini

a. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Di Kota Gunungsitoli pada tahun 2009 jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih 4.685, atau 22,21% dari jumlah rumah tangga. Sedangkan pada tahun 2010 meningkat menjadi 6.364 atau 26,87% dari jumlah rumah tangga.

Tabel 2.26
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih Kota Gunungsitoli

No	Sumber Air Bersih	2009	2010
1.	Leding (Perpipaan)	4.685	6.364
2.	Sumur Lindung	0	0
3.	Sumur Tidak Terlindung	0	0
4.	Mata Air Terlindung	0	0
5.	Mata Air Tidak Terlindung	0	0

No	Sumber Air Bersih	2009	2010
6.	Sungai	0	0
7.	Danau/Waduk	0	0
8.	Air Hujan	0	0
9.	Air Kemasan	0	0
10.	Lainnya	0	0
11.	Total Jumlah Rumah Tangga yang menggunakan air bersih	4.685	6.364**
12.	Jumlah Rumah Tangga	21.094*	23.677*
13.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan air bersih (11/12)	22,21	26,87

Sumber : *) BPS Kabupaten Nias
 **) PDAM Tirta Umbu

2.4.5 Fasilitas listrik dan telepon

Kondisi ketersediaan fasilitas listrik dan telepon di Kota Gunungsitoli tahun 2010 dalam kaitan dengan aspek kesejahteraan umum dapat dilihat melalui indikator berikut ini

a. Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Gunungsitoli tahun 2010 sebanyak 25.748.705 Kwh. Sementara sektor lainnya antara lain : komersil 4.701.707 Kwh, industri 778.639 Kwh, umum 1.217.016 Kwh. Jumlah penggunaan listrik sebanyak 32.446.067 Kwh .

Tabel 2.27
Perkembangan Penjualan Energi Listrik Menurut Pelanggan di Kota Gunungsitoli (KWh)

No	Pelanggan	2009	2010
1.	Rumah Tangga	0	25.748.705 Kwh.
2.	Komersil	0	4.701.707 Kwh
3.	Industri	0	778.639 Kwh
4.	Umum	0	1.217.016 Kwh
Jumlah		0	32.446.067 Kwh

Sumber : PT PLN Kabupaten Nias

Tabel 2.28
Perkembangan Nilai Penjualan Energi Listrik Menurut Pelanggan
di Kota Gunungsitoli (Juta Rupiah)

No	Pelanggan	2009	2010
1.	Rumah Tangga	0	13.895.891.545
2.	Komersil	0	4.148.655.655
3.	Industri	0	637.485.600
4.	Umum	0	905.848.685
Jumlah		0	19.587.881.685

Sumber : PT PLN Kabupaten Nias

b. Persentase Penduduk Yang Menggunakan Hp/Telepon

Pada tahun 2010 jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon di Kota Gunungsitoli sebanyak 71.064 jiwa atau 56,31% dari total jumlah penduduk Kota Gunungsitoli.

Tabel 2.29
Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan HP/Telepon
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2010
1.	Penduduk yang memiliki HP	69.169
2.	Penduduk yang memiliki telepon PSTN	1.895
3.	Total Jumlah penduduk yang memiliki HP/Telepon (1) + (2)	71.064
4.	Jumlah penduduk	126.202
5.	Persentase penduduk yang menggunakan HP/Telepon (3)/(4)	56,31

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Gunungsitoli

2.4.6 Fasilitas Restoran dan Penginapan

Kondisi ketersediaan fasilitas Restoran dan Penginapan di Kota Gunungsitoli tahun 2010 dalam kaitan dengan aspek kesejahteraan umum dapat dilihat melalui indikator berikut ini

a. Ketersediaan Restoran

Pada tahun 2010 jumlah restoran di Kota Gunungsitoli sebanyak 54 unit dengan jumlah kursi sebanyak 594 buah. Rincian kelas restoran yaitu usaha makan kelas B, C dan D.

Tabel 2.30
Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran
Kota Gunungsitoli

No	Uraian	2010	
		Jumlah Usaha	Jumlah Kursi
1.	Usaha restoran golongan tertinggi	0	0
2.	Usaha restoran golongan menengah	0	0
3.	Usaha restoran golongan terendah	0	0
4.	Usaha rumah makan kelas A	0	0
5.	Usaha rumah makan kelas B	12	240
6.	Usaha rumah makan kelas C	17	204
7.	Usaha rumah makan kelas D	25	150
8.	Usaha rumah makan kelas	0	0
9.	Jenis Usaha Restoran	0	0
10.	Jenis Usaha Rumah Makan	0	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli

b. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan penginapan/hotel. Pada tahun 2010 jumlah penginapan/hotel di Kota Gunungsitoli berjumlah 20 buah (hotel non bintang) dengan jumlah kamar sebanyak 298 buah dan jumlah tempat tidur sebanyak 595 buah.

Tabel 2.31
Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel
Kota Gunungsitoli

No	Jenis Penginapan/Hotel	2010		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
1.	Hotel Bintang 5	0	0	0
2.	Hotel Bintang 4	0	0	0
3.	Hotel Bintang 3	0	0	0
4.	Hotel Bintang 2	0	0	0

No	Jenis Penginapan/Hotel	2010		
		Jumlah Hotel	Jumlah Kamar	Jumlah Tempat Tidur
5.	Hotel Bintang 1	0	0	0
6.	Hotel Non Bintang (hotel melati dan penginapan lainnya)	20	298	596
7.	Total Jumlah penginapan/Hotel	20	298	596

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kota Gunungsitoli

2.4.7 Iklim Investasi

Kondisi Investasi di Kota Gunungsitoli tahun 2010 dalam kaitan dengan aspek kesejahteraan umum dapat dilihat melalui indikator berikut ini

a. Angka Kriminalitas

Pada tahun 2009 jumlah tindak kriminal yang dilaporkan berjumlah 239 kasus dengan angka kriminalitas sebesar 0,19 persen dari jumlah penduduk. Untuk tahun 2010 jumlah tindak kriminal yang dilaporkan meningkat sebesar 607 kasus dengan angka kriminalitas sebesar 0,48 persen.

Tabel 2.32

Angka Kriminalitas yang dilaporkan 2009-2010

No	Jenis Kriminal	2009	2010
1	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	239	607
2	Jumlah Penduduk	126.202	126.202
3	Angka Kriminalitas	0,19	0,48

Sumber : Gunungsitoli Dalam Angka 2011

b. Jumlah Demontran

Pada tahun 2009 jumlah demonstrasi di Kota Gunungsitoli sebanyak 2 kali dalam bidang ekonomi, dan untuk tahun 2010 demonstrasi sebanyak 7 kali dalam bidang politik sebanyak 4 kali dan 3 kali bidang ekonomi .

Tabel 2.33**Jumlah Demonstrasi Kota Gunungsitoli 2009-2010**

No	Uraian	2009	2010
1	Bidang Politik	0	4
2	Ekonomi	2	3
3	Kasus pemogokan kerja	0	0
4	Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa	2	7

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kota Gunungsitoli

c. Tingkat Ketergantungan

Berdasarkan Sensus Penduduk 2010 di Kota Gunungsitoli jumlah penduduk usia tidak produktif berjumlah 48.740 orang dengan rasio ketergantungan sebesar 62,92 persen dari jumlah penduduk usia 15-64 tahun berjumlah 77.462 orang.

Tabel 2.34**Rasio Ketergantungan Tahun 2009 s.d 2010 Kota Gunungsitoli**

No	Uraian	2009	2010
1.	Jumlah Penduduk Usia < 15 tahun	0	44.901
2.	Jumlah Penduduk usia > 64 tahun	0	3.839
3.	Jumlah Penduduk Usia Tidak Produktif (1) &(2)	0	48.740
4.	Jumlah Penduduk Usia 15-64 tahun	0	77.462
5.	Rasio ketergantungan (3) / (4)	0	62,92

Sumber : SP2010, BPS Kabupaten Nias

BAB III

ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis merupakan proyeksi kondisi dimasa depan yang memerlukan perhatian dalam perencanaan pembangunan kurun waktu lima tahun ke depan periode pemerintahan kepala daerah terpilih, yang diperkirakan memiliki dampak signifikan terhadap berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli. Analisa Isu-isu strategis tersebut di butuhkan untuk mengantisipasi kemungkinan dampak kerugian yang akan ditimbulkan dalam periode perencanaan, serta sekaligus mengoptimalkan peluang dan potensi yang dimiliki sebagai upaya mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis kondisi objektif daerah Kota Gunungsitoli berdasarkan dinamika perkembangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan pembangunan kurun waktu beberapa tahun terakhir ini, serta memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat regional, nasional dan internasional, maka adapun permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan daerah Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun ke depan ini adalah sebagai berikut.

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan daerah pada hakekatnya merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan proyeksi perencanaan kondisi ideal yang ingin dicapai di masa yang datang. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi. Untuk memastikan bahwa visi dan misi kepala daerah terpilih dirumuskan dengan tepat, dibutuhkan analisis yang mendalam tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi oleh Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun ke depan.

Perumusan permasalahan pembangunan diawali melalui Identifikasi permasalahan pembangunan dari informasi pada gambaran umum daerah dan evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya. Permasalahan pembangunan dimaksud selanjutnya akan menjadi salah satu

input dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2011-2016. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, maka permasalahan pembangunan Kota Gunungsitoli dalam jangka menengah terkait dengan penerjemahan visi dan misi daerah adalah sebagai berikut :

a. Infrastruktur Dasar dan Strategis

Permasalahan umum infrastruktur di wilayah Kota Gunungsitoli adalah belum optimalnya pengembangan beberapa infrastruktur dasar dan strategis di setiap wilayah kecamatan sehingga menghambat aksesibilitas masyarakat dan mengurangi daya dukung terhadap daya saing daerah untuk mewujudkan perekonomian daerah yang tangguh bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Permasalahan pembangunan di bidang infrastruktur meliputi :

1. Belum meratanya kualitas infrastruktur jalan yang menghubungkan antar wilayah kecamatan.

Sebagian besar kecamatan yang berada di wilayah pesisir Kota Gunungsitoli memiliki kualitas infrastruktur jalan yang relatif memadai. Namun masih terdapat wilayah kecamatan yang kondisi infrastruktur jalannya sangat memprihatinkan sehingga dibutuhkan upaya percepatan penanganan pembangunan untuk sejajar dengan wilayah kecamatan lainnya.

2. Beberapa wilayah ibu kota kecamatan belum memiliki jaringan infrastruktur jalan yang menghubungkan wilayah perdesaan dan daerah sentra-sentra produksi masyarakat.

Kondisi infrastruktur jalan yang menghubungkan beberapa wilayah perdesaan dan daerah sentra-sentra produksi masyarakat di Kota Gunungsitoli relatif belum memadai dan terkesan terisolir. Hal ini sangat berdampak terhadap aksesibilitas masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dan membuka keterisoliran daerah-daerah tertentu, maka pembangunan infrastruktur jalan merupakan salah satu alternatif solusi mempercepat ketimpangan pembangunan antar wilayah yang pada gilirannya diharapkan akan berdampak pada peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat.

3. Sebagian wilayah perdesaan belum memiliki sarana dan prasarana air minum yang memadai.

Wilayah Kota Gunungsitoli yang sebagian besar berada di daerah perdesaan, memiliki infrastruktur air bersih yang relatif sangat terbatas. Hal ini sangat berdampak terhadap pola hidup sehat dari masyarakat serta peningkatan kualitas kehidupan. Pembangunan infrastruktur air bersih merupakan salah satu prioritas untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih.

4. Belum adanya penanganan sungai dan pengamanan pantai yang optimal di seluruh wilayah Kota Gunungsitoli.

Wilayah Kota Gunungsitoli sebagian besar dilalui oleh sungai besar dan kecil serta berada di daerah pesisir pantai. Kondisi sebagian besar sungai dan pantai belum memiliki infrastruktur pengendalian dan pengamanan yang memadai. Hal ini sangat berdampak terhadap terjadinya degradasi lingkungan hidup dan berpotensi pada munculnya ancaman bencana alam bagi kehidupan masyarakat. Pengendalian sungai dan pengamanan pantai menjadi prioritas pembangunan untuk mengurangi resiko ancaman penurunan kualitas lingkungan hidup dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

5. Sebagian besar drainase di dalam kota dan wilayah permukiman penduduk belum berfungsi secara optimal.

Wilayah Kota Gunungsitoli berada di wilayah rawan bencana alam. Salah satu bencana alam yang rutin dihadapi Kota Gunungsitoli dewasa ini adalah bencana banjir. Sistem drainase didalam kota yang sebagian besar tidak berfungsi sebagaimana mestinya, menjadi penyebab utama tidak terkendalinya distribusi debit air setiap kali terjadinya curah hujan yang cukup tinggi. Penataan ulang sistem drainase di daerah perkotaan menjadi prioritas pembangunan, untuk mewujudkan kondisi Kota Gunungsitoli yang bebas dari masalah banjir.

6. Sarana dan prasarana perkantoran yang masih belum memadai.

Sarana dan prasarana perkantoran yang digunakan pemerintah Kota Gunungsitoli dewasa ini merupakan hibah dari pemerintah Kabupaten Nias. Kondisi sebagian besar sarana dan prasarana perkantoran dimaksud relatif kurang memadai. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja pelayanan aparatur baik dari aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan sosial kemasyarakatan. Pembangunan sarana dan prasarana perkantoran merupakan salah satu prioritas pemerintah daerah, dalam rangka mengoptimalkan kinerja pelayanan aparatur bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

7. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

Produksi sampah di Kota Gunungsitoli dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang signifikan. Kota Gunungsitoli sebagai pusat berbagai aktivitas di Kepulauan Nias sangat berdampak terhadap peningkatan produksi sampah dimaksud. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan yang dimiliki menyebabkan belum optimalnya penanganan kebersihan di wilayah Kota Gunungsitoli.

8. Keterbatasan ketersediaan alat-lat berat.

Ketersediaan alat-alat berat yang dimiliki pemerintah Kota Gunungsitoli relatif sangat terbatas. Kebutuhan alat-alat berat dewasa ini sangat mendesak dan prioritas, terkait dengan berbagai pembangunan fisik yang kini sedang dan akan terus dilaksanakan serta kondisi geografis wilayah Kota Gunungsitoli sebagai daerah rawan bencana, sangat membutuhkan keberadaan alat-lat berat untuk menangani dampak yang ditimbulkan oleh bencana alam.

9. Keterbatasan infrastruktur di wilayah permukiman penduduk.

Wilayah permukiman penduduk di Kota Gunungsitoli sebagian besar belum memiliki infrastruktur dasar yang memadai. Sebagian besar permukiman penduduk belum merupakan permukiman yang layak sebagaimana di daerah perkotaan pada umumnya. Hal ini sangat berdampak pada peningkatan akses masyarakat terhadap lingkungan permukiman yang sehat dan berkualitas, untuk mendukung upaya peningkatan kualitas kehidupan yang lebih baik dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan.

10. Jaringan irigasi yang belum berfungsi secara optimal.

Kegiatan produksi masyarakat di sektor pertanian tanaman pangan umumnya belum didukung oleh sarana irigasi yang memadai. Sarana dan prasarana irigasi yang tersedia belum berfungsi secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan pada peningkatan hasil produksi masyarakat. Luas lahan pertanian yang cukup tersedia di wilayah Kota Gunungsitoli sangat membutuhkan sarana dan prasarana irigasi yang memadai, yang diharapkan akan meningkatkan pendapatan masyarakat petani dan mengurangi ketergantungan kebutuhan beras dari luar daerah secara bertahap.

11. Belum berfungsinya infastruktur strategis di bidang perikanan.

Kota Gunungsitoli sebagian besar berada di wilayah pesisir pantai, memiliki potensi sumber daya hayati kelautan dan perikanan yang belum dikelola secara optimal. Keberadaan beberapa infrastruktur strategis di bidang perikanan seperti : Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Balai Benih Air Tawat (BBIAT) belum berfungsi sebagaimana mestinya, sehingga belum memberikan kontribusi bagi pengelolaan potensi perikanan yang tersedia.

12. Keterbatasan sumber daya energi

Kebutuhan energi di Kota Gunungsitoli dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya energi dewasa ini sangat dibutuhkan dengan kapasitas yang lebih besar, untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah Kota Gunungsitoli. Demikian juga halnya pembangunan sumber daya energi alternatif merupakan salah satu solusi di masa mendatang untuk mengantisipasi kebutuhan energi yang semakin meningkat.

13. Keterbatasan kapasitas bandar udara dan pelabuhan laut.

Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias membutuhkan pengembangan infrastruktur bandar udara dan pelabuhan laut, untuk mengantisipasi arus penumpang dan bongkar muat yang terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Keberadaan lima daerah otonom di Kepulauan Nias juga menjadi salah satu alasan penting mengapa perlu peningkatan kapasitas sarana dan prasarana bandar udara dan pelabuhan laut yang lebih memadai.

b. Pendidikan

Permasalahan umum pembangunan kependidikan di Kota Gunungsitoli adalah kualitas pendidikan yang relatif masih rendah dan belum meratanya kualitas pendidikan itu sendiri di setiap wilayah kecamatan. Hal ini disebabkan keterbatasan dan ketidakmerataan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan kependidikan. Pemasalahan pembangunan kependidikan di Kota Gunungsitoli meliputi :

1. Keterbatasan dan ketidakmerataan sarana dan prasarana kependidikan yang memadai.

Ketersediaan sarana dan prasarana kependidikan yang memadai di Kota Gunungsitoli relatif masih terbatas. Ketimpangan penyebaran sarana dan prasarana kependidikan yang memadai masih sangat besar. Tuntutan kebutuhan sarana dan prasarana kependidikan tidak sebanding dengan upaya pembangunan yang telah dilakukan selama ini. Untuk itu dibutuhkan pengkajian ulang tentang pola pembangunan sarana dan prasarana kependidikan yang sesuai dengan kondisi saat ini.

2. Keterbatasan dan ketidakmerataan tenaga kependidikan.

Tenaga kependidikan yang ada di wilayah Kota Gunungsitoli secara umum relatif masih sangat terbatas, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pemerataan tenaga kependidikan di setiap wilayah kecamatan menjadi masalah klasik yang hingga saat ini belum tuntas penanganannya. Peningkatan dan pemerataan tenaga kependidikan menjadi prioritas pembangunan untuk memudahkan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas.

3. Rendahnya kesejahteraan guru.

Kesejahteraan guru di wilayah Kota Gunungsitoli relatif masih sangat rendah. Kemampuan daerah untuk meningkatkan taraf kesejahteraan guru masih sangat terbatas. Pemerintah daerah secara bertahap diharapkan memberikan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap peningkatan kesejahteraan guru, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Tingginya angka putus sekolah

Angka putus sekolah di Kota Gunungsitoli relatif masih tinggi, dibandingkan daerah-daerah lain di Sumatera Utara. Hal ini disebabkan beberapa faktor antara lain : faktor ekonomi dan faktor rendahnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan itu sendiri. Untuk mengurangi angka putus sekolah dibutuhkan upaya bersama melalui sejumlah kebijakan pembangunan baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral.

5. Rendahnya angka melek huruf

Angka melek huruf yang relatif masih rendah merupakan salah satu indikasi belum optimalnya pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat di bidang pendidikan. Rendahnya angka melek huruf menggambarkan terbatasnya aksesibilitas masyarakat terhadap aktivitas kependidikan dan adanya ketimpangan implementasi kebijakan pendidikan itu sendiri di setiap cakupan wilayah pelayanan kependidikan.

6. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung kependidikan

Sarana dan prasarana pendukung kependidikan yang tersedia relatif masih sangat terbatas dan belum memadai. Keberadaan sarana dan prasarana pendukung kependidikan seperti : perpustakaan, laboratorium, dsb sangat dibutuhkan untuk terlaksananya pendidikan berkualitas dan merata di setiap wilayah. Sarana pembelajaran yang memadai merupakan keharusan dalam proses belajar mengajar dewasa ini dalam upaya menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

c. Kesehatan

Permasalahan umum pembangunan kesehatan di Kota Gunungsitoli adalah derajat kesehatan masyarakat yang relatif masih rendah, sebagai dampak keterbatasan dan ketidakmerataan penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan masyarakat. Di samping itu tingkat kesejahteraan masyarakat relatif sangat mempengaruhi kemampuan untuk meningkatkan derajat kesehatannya. Permasalahan pembangunan kesehatan di Kota Gunungsitoli meliputi :

1. Keterbatasan dan ketidakmerataan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai.

Sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di wilayah Kota Gunungsitoli relatif masih sangat terbatas. Rasio ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dengan jumlah penduduk masih sangat rendah. Demikian juga halnya, penyebaran sarana dan prasarana kesehatan yang memadai di setiap wilayah kecamatan relatif masih belum merata.

2. Keterbatasan dan ketidakmerataan sumber daya manusia bidang kesehatan

Sumber daya manusia bidang kesehatan relatif masih sangat terbatas dan belum merata di setiap wilayah Kecamatan. Kondisi ini sangat berdampak terhadap upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara umum dan peningkatan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat di bidang kesehatan.

3. Keterbatasan ketersediaan kebutuhan perbekalan kesehatan

Kebutuhan perbekalan kesehatan dewasa ini terus mengalami peningkatan, seiring meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan sebagai investasi yang mahal dan berharga. Kemampuan pemerintah daerah untuk mengadakan perbekalan kesehatan yang memadai relatif terbatas. Kebutuhan perbekalan kesehatan selama ini sebagian besar merupakan bantuan dari pemerintah tingkat atas.

4. Penanganan prevelansi gizi kurang.

Penanganan prevelansi gizi kurang di Kota Gunungsitoli relatif sudah terlaksana namun belum optimal. Kondisi ini disebabkan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah sebagai daerah otonom baru. Taraf kesejahteraan masyarakat yang relatif masih rendah juga sangat berdampak terhadap derajat kesehatan masyarakat. Ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan asupan gizi akibat keterbatasan ekonomi, merupakan salah satu faktor penyebab prevelansi gizi kurang.

5. Penanganan penyakit menular

Penanganan penyakit menular akibat wabah luar biasa di Kota Gunungsitoli relatif sudah terlaksana dengan baik. Namun perlu upaya

lebih lanjut untuk mencegah meluasnya penyakit menular melalui sejumlah kebijakan pembangunan baik yang sifatnya sektoral maupun lintas sektoral. Upaya mewaspadaikan sejak dini bahaya penyakit menular perlu lebih ditingkatkan baik dari aspek kelembagaan maupun dari aspek cakupan pelayanan.

d. Perekonomian Daerah

Permasalahan umum pembangunan perekonomian daerah adalah belum optimalnya pengembangan kegiatan produksi dan kelembagaan usaha masyarakat sehingga nilai tambah produk-produk berbasis pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, kepariwisataan, dan industri rumah tangga relatif masih sangat rendah. Hal ini menyebabkan tingkat kesejahteraan sebagian besar masyarakat relatif masih rendah sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan perekonomian daerah. Permasalahan pembangunan perekonomian daerah Kota Gunungsitoli meliputi :

1. Rendahnya produktivitas masyarakat di berbagai sektor perekonomian.

Kemampuan produksi masyarakat diberbagai sektor perekonomian belum optimal sehingga belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini disebabkan teknologi berproduksi yang masih sangat sederhana akibat rendahnya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

2. Terbatasnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana produksi yang memadai.

Kegiatan produksi masyarakat tidak didukung sarana produksi yang memadai seperti : permodalan, bibit unggul, alat mesin pertanian, dsb. Hal ini sangat berdampak terhadap kapasitas produksi yang dimiliki sehingga belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat pada umumnya.

3. Lemahnya kelembagaan usaha masyarakat.

Kelembagaan usaha masyarakat pada umumnya masih bersifat sederhana baik dari aspek pengelolaan maupun dari aspek aktivitas bisnis yang dilakukan. Hal ini sangat dipengaruhi keterbatasan sumber daya manusia, permodalan dan jaringan pemasaran/kemitraan usaha. Peran pemerintah daerah dalam upaya penguatan kelembagaan usaha masyarakat dewasa ini masih relatif terbatas.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana kepariwisataan.

Pengembangan Kota Gunungsitoli sebagai daerah tujuan wisata baik dari berbagai aspek dan dimensi pembangunan kepariwisataan belum terlaksana secara optimal. Sarana dan prasarana kepariwisataan yang tersedia relatif sangat terbatas. Daya tarik kepariwisataan dengan segala fasilitas yang dibutuhkan untuk itu, belum mencerminkan Kota Gunungsitoli sebagai daerah tujuan wisata. Kondisi ini disebabkan belum adanya rencana strategi pengembangan kepariwisataan Kota Gunungsitoli.

5. Terbatasnya sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

Aktivitas perdagangan di Kota Gunungsitoli dari waktu ke waktu mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terbesar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Gunungsitoli. Kondisi ini belum didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan yang memadai.

6. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya mineral yang tersedia .

Wilayah Kota Gunungsitoli memiliki potensi kandungan sumber daya mineral antara lain : batu bara, batu gamping, tanah liat, dsb yang belum dikelola secara optimal sehingga belum memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing daerah. Salah satu potensi kandungan sumber daya mineral, yang kini sedang menarik perhatian para investor yaitu batu bara. Realisasi investasi pertambangan batu bara, diharapkan akan menjadi salah satu motor penggerak roda perekonomian dan daya saing daerah. Disamping itu, batu bara dapat menjadi salah satu sumber daya energi alternatif untuk memenuhi kebutuhan energi di Kota Gunungsitoli pada masa mendatang.

e. Pemerintahan Umum

Permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan umum di Kota Gunungsitoli adalah belum optimalnya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan umum sehingga kinerja pelayanan publik relatif masih sangat rendah. Keberadaan Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru yang memiliki berbagai keterbatasan merupakan faktor utama belum optimalnya kinerja pelayanan publik kurun waktu dua tahun terakhir ini. Permasalahan umum penyelenggaraan pemerintahan umum di Kota Gunungsitoli meliputi :

1. Keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang tersedia.

Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru memiliki keterbatasan sumber daya manusia aparatur yang tersedia. Di samping itu, penempatan sumber daya aparatur di setiap unit kerja sebagian besar belum mencerminkan pemerataan dan latar belakang pendidikan maupun pengalaman daripada aparatur bersangkutan. Kondisi ini menyebabkan belum optimalnya kinerja pelayanan aparatur. Untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan, maka perencanaan kebutuhan sumber daya aparatur diharapkan sesuai dengan kebutuhan daerah baik dari aspek kuantitatif maupun dari aspek kualifikasi pendidikan.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana kerja yang memadai.

Kinerja pelayanan aparatur daerah di Kota Gunungsitoli secara umum relatif belum optimal. Kinerja pelayanan aparatur belum didukung dengan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Kondisi ini disebabkan kemampuan fiskal daerah yang tidak sebanding dengan cakupan permasalahan yang harus ditangani sebagai daerah otonom baru.

3. Keterbatasan produk regulasi daerah.

Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru sebagian besar masih menggunakan produk regulasi dari Kabupaten Nias sebagai daerah induk pemekaran. Keterbatasan produk regulasi daerah, berdampak terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan aparatur.

4. Belum optimalnya penataan struktur organisasi pemerintah daerah.

Struktur organisasi pemerintah daerah Kota Gunungsitoli pada hakekatnya belum mencerminkan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan dewasa ini. Disain struktur organisasi sangat terkait dengan pelaksanaan roda pemerintahan yang efisien dan efektif serta tanggap terhadap tuntutan perubahan. Struktur organisasi pemerintah daerah, seyogyanya mempertimbangkan sumber daya aparatur yang tersedia dan kapasitas fiskal daerah.

5. Terbatasnya kapasitas fiskal daerah.

Kemampuan fiskal daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan di Kota Gunungsitoli relatif sangat terbatas. Sumber utama pembiayaan pembangunan masih bergantung terhadap bantuan pemerintah tingkat atas. Pendapatan asli daerah yang diharapkan secara bertahap menjadi sumber fiskal daerah, belum mencerminkan perkembangan yang signifikan kurun waktu dua tahun terakhir. Hal ini disebabkan belum optimalnya penataan regulasi dan objek-objek sumber-sumber pendapatan asli daerah.

4.2. Isu Strategis

Isu-isu strategis selain berasal dari permasalahan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di sub bab di atas, juga berasal dari analisis lingkungan eksternal. Di samping harus mampu menciptakan peluang, sekaligus harus mampu memanfaatkan berbagai peluang yang akan muncul dalam 5 (lima) tahun mendatang, termasuk mengantisipasi berbagai ancamannya.

Analisis lingkungan eksternal dapat diambil dari berbagai informasi dari dunia internasional, kebijakan nasional, regional dan lain-lain yang berdampak langsung pada pembangunan Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun kedepan. Adapun isu-isu strategis dimaksud antara lain :

4.2.1. Analisa Lingkungan Internal

4.2.1.1. Kekuatan

Kekuatan merupakan modal utama untuk mengoptimalkan dan memberhasilkan berbagai kebijakan dan program pembangunan Kota Gunungsitoli kurun waktu lima tahun ke depan. Adapun kekuatan dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Letak geografis Kota Gunungsitoli yang sangat strategis sebagai pintu masuk Kepulauan Nias.
- b. Ragam potensi sumber daya alam yang belum dikelola secara optimal.
- c. Ketersediaan infrastruktur strategis yang mendukung daya saing daerah.

- d. Jumlah penduduk dan angkatan kerja yang relatif cukup besar untuk kebutuhan berbagai program dan kegiatan pembangunan.
- e. Kehidupan sosial kemasyarakatan dan kerukunan antar umat beragama yang sangat kondusif.
- f. Ciri khas dan karakteristik daerah yang memiliki adat istiadat dan akar budaya yang kuat.
- g. Potensi ketersediaan lahan produktif yang relatif cukup besar.

4.2.1.2. Kelemahan

Kelemahan merupakan aspek-aspek dalam organisasi yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki sehingga tidak menimbulkan kendala dan hambatan dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Adapun kendala dimaksud antara lain :

- a. Kualitas sumber daya manusia secara umum relatif masih terbatas.
- b. Kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah yang relatif masih terbatas.
- c. Derajat kesehatan masyarakat yang masih rendah.
- d. Kemampuan fiskal daerah yang masih sangat terbatas.
- e. Regulasi daerah yang masih sangat terbatas.
- f. Iklim investasi yang masih belum kondusif.
- g. Kemampuan produksi masyarakat yang relatif masih terbatas.
- h. Pasokan energi untuk kebutuhan masyarakat yang masih sangat terbatas.
- i. Sarana dan prasarana perkantoran pemerintah daerah yang sangat terbatas.
- j. Sebagian besar wilayah merupakan daerah rawan bencana alam.

4.2.2. Analisa Lingkungan Eksternal

4.2.2.1. Peluang

Peluang merupakan kondisi lingkungan eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi. Adapun peluang dimaksud antara lain :

- a. Keberadaan beberapa daerah otonom di Kepulauan Nias.
- b. Kebijakan pemerintah provinsi Sumatera Utara yang menetapkan Kepulauan Nias sebagai satu wilayah pembangunan.
- c. Sebagai satu-satunya daerah otonom yang berbentuk kota di Kepulauan Nias, memiliki potensi yang sangat besar pada sektor jasa, perdagangan dan industri.
- d. Sebagai pusat pendidikan dan kesehatan bagi daerah otonom lainnya di Kepulauan Nias.
- e. Ketersediaan infrastruktur pelabuhan laut dan pelabuhan udara.
- f. Rekomendasi pembentukan Provinsi Kepulauan Nias

4.2.2.1. Ancaman

Ancaman merupakan kondisi yang berpotensi menjadi penghambat sekaligus tantangan dalam memberhasikan pencapaian tujuan suatu organisasi. Adapun ancaman dimaksud sebagai berikut :

- a. Bencana alam dan perubahan iklim global.
- b. Kelangkaan bahan pangan, berpotensi meningkatnya penduduk di bawah garis kemiskinan.
- c. Arus globalisasi yang berdampak pada degradasi moral generasi muda dan masyarakat pada umumnya.
- d. Maraknya peredaran obat-obat terlarang, perdagangan anak, prostitusi, *illegal logging* dan *illegal fishing*.

4.2.3. Analisa lingkungan strategis lainnya.

1. Kebijakan Internasional

Salah satu isu strategis di tingkat internasional yang relevan bagi perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi Kota Gunungsitoli, antara lain:

a. Tatanan perekonomian global yang mendorong meningkatnya kerjasama ekonomi Regional seperti : WTO, ASEAN, APEC, EEC, AFTA, ACFA, G-8 dsb.

Pembentukan forum kerjasama ekonomi regional pada umumnya bertujuan untuk menghilangkan hambatan terhadap arus perdagangan barang dan jasa antar negara maupun antar kawasan, yang meliputi penghapusan berbagai bea dan pajak dan ketentuan lain yang bersifat menghambat.

b. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak individu.

Arus informasi yang semakin mengglobal memudahkan masyarakat mengakses berbagai sumber informasi, sehingga menciptakan persepsi kebebasan individu yang berlebihan. Hal ini perlu diwaspadai bersama, karena berpotensi menggerus hak dan kepatutan umum serta kearifan lokal yang makin terabaikan. Kebijakan publik perlu menyeimbangkan dua aspek tersebut dengan tetap menjaga keberpihakan pada pelestarian budaya lokal.

c. Penyelamatan bumi akibat degradasi lingkungan yang semakin mengglobal.

Kawasan hutan dunia sebagai paru-paru bumi dari waktu ke waktu mengalami penurunan kualitas, akibat eksploitasi yang terlalu berlebihan. Kebijakan pembangunan harus lebih *prudent* menyangkut penggunaan lahan hutan bagi pembangunan daerah karena akan berpotensi mendapat sorotan dunia internasional. Pengembangan aktivitas ekonomi harus selalu dalam konteks menjaga kelestarian alam dan khususnya vegetasi hutan dan ekosistem di dalamnya.

d. Milenium Development Goals (MDGs)

Komitmen MDG's yang telah diadopsi secara nasional harus dicapai sampai akhir tahun 2015. Capaian-capaian penting itu menyangkut pemberantasan kemiskinan dan kelaparan ekstrem, peningkatan persamaan *gender* dan pemberdayaan kaum wanita, penurunan tingkat kematian anak, antisipasi terjadinya penyakit HIV/AIDS, malaria, dan penyakit lainnya yang menjadi masalah internasional, dan memastikan keberlangsungan lingkungan (*environmental sustainability*); sesuai target yang harus dicapai.

2. Kebijakan Nasional

Penentuan isu strategis di tingkat nasional diwarnai oleh kebijakan nasional; dimaksudkan untuk sinkronisasi dan menjamin tujuan pembangunan nasional telah didukung dan dilaksanakan oleh daerah. Sehingga penentuan arah kebijakan Kota Gunungsitoli sejalan dengan arah kebijakan yang dituju oleh nasional.

a. Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi.

Penegakkan hukum dan pemberantasan korupsi dewasa ini, merupakan isu strategis yang kini sedang hangat diperdebatkan. Penegakkan hukum yang masih bersifat tebang pilih seringkali menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja institusi penegak hukum. Pemerintah daerah dalam kerangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, dituntut untuk senantiasa merespon isu-isu penegakkan hukum dan anti KKN pada semua level dan tingkatan pemerintahan.

b. Kelangkaan BBM dan keterbatasan Sumber Daya Energi Listrik.

Kelangkaan bahan bakar minyak dan krisis energi dewasa ini menjadi isu strategis, yang membutuhkan solusi penanganan dalam jangka panjang. Kelangkaan BBM dan keterbatasan pasokan kebutuhan listrik di Kota Gunungsitoli sudah sangat mendesak untuk ditingkatkan seiring dengan permasalahan kebutuhan listrik secara nasional. Permasalahan listrik bukan saja menyangkut kebutuhannya di masa datang untuk menggenjot aktivitas ekonomi daerah, bahkan untuk kebutuhan dalam skala normal saja hingga kini masih menjadi kendala. Masih sering terjadi pemadaman bergilir pada saat beban puncak. Arah pengembangan wilayah Kota Gunungsitoli sebagai pusat pengembangan jasa, perdagangan, dan industri membutuhkan pasokan energi listrik yang andal dengan sistem jaringan yang terintegrasi untuk satu wilayah. Pengembangan ekonomi lokal dalam kegiatannya memerlukan pasokan energi listrik yang andal dalam proses produksi, kedepan perlu diantisipasi dengan menaikkan rasio ketersediaan daya listrik di Kota Gunungsitoli.

b. Pemahaman isu demokratisasi dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan masyarakat.

Pemahaman masyarakat tentang demokrasi yang masih belum merata, seringkali menyebabkan penerapan prinsip demokrasi dalam lingkungan kehidupan sehari-hari tidak mengikuti aturan main dan cenderung destruktif. Ketimpangan sosial dan ekonomi yang belum terjawab sepenuhnya oleh keberhasilan pembangunan, memunculkan bahaya laten yang setiap waktu dapat dipicu baik oleh isu nasional maupun lokal.

c. Penghormatan dan pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM)

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional memberikan dampak besar bagi Indonesia. Pemerintah dan masyarakat telah menyadari akan pentingnya masalah HAM dan ini terbukti dengan telah dibentuknya beberapa lembaga/institusi yang menangani HAM seperti: Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Komisi Nasional Perempuan, Komisi Ombudsman Nasional, serta LSM yang peduli dan kegiatan utamanya di bidang HAM. Saat ini banyak permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat diadukan ke Komnas HAM bukan kepada aparat penegak hukum. Penghormatan kepada hak-hak individu akhir-akhir ini cenderung meningkat dan diprediksi hal ini akan tetap menjadi fokus perhatian dunia ke depan.

d. Pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup.

Masalah kelestarian lingkungan hidup akan tetap menjadi fokus perhatian masyarakat Indonesia ke depan. Sebagaimana halnya pada lingkup global, pada tataran nasionalpun masalah lingkungan hidup ini akan tetap menjadi hal yang menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Adanya pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup di suatu daerah akan dengan sangat cepat menjadi berita nasional. Masalah kerusakan lingkungan hidup di suatu daerah sering menjadi headline berita

dari surat-surat kabar nasional. Pengelolaan lingkungan hidup termasuk pencegahan, penanggulangan kerusakan dan pencemaran serta pemulihan kualitas lingkungan telah menuntut dikembangkannya berbagai perangkat kebijaksanaan dan program serta kegiatan yang didukung oleh sistem pendukung pengelolaan lingkungan lainnya. Sistem tersebut mencakup kemantapan kelembagaan, sumberdaya manusia dan kemitraan lingkungan, disamping perangkat hukum dan perundangan, informasi serta pendanaan.

e. Implementasi Otonomi Daerah

Implementasi otonomi daerah pada hakekatnya merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan. Pemberlakuan otonomi daerah menimbulkan dampak yang signifikan ini namun tidak sedikit pula yang sebaliknya. Bagi daerah yang kurang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya harus bekerja lebih keras lagi sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama sudah membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.

3. Kebijakan Regional

Dalam hal penentuan isu strategis perlu memperhatikan kebijakan regional, yang dimaksudkan untuk penyelarasan arah kebijakan pembangunan jangka panjang antar daerah, antara lain:

- a. Grand Strategy Pembangunan Sumatera Utara yang meliputi :
 - 1) Program Prioritas Sumatera Utara
 - Peningkatan percepatan pembangunan infrastruktur.
 - Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
 - Memperbaiki perekonomian daerah melalui revitalisasi pertanian, peternakan, perkebunan, kelautan dan kehutanan.
 - Mendorong pengetahuan politik, hukum dan keamanan serta peningkatan kesejahteraan sosial.

- 2) Pelaksanaan pembangunan lintas wilayah Sumatera Utara
 - Agromarinepolitan pesisir, pulau-pulau kecil dan pulau terluar.
 - Kerjasama sharing pendanaan pendidikan dan kesehatan.
 - Kerjasama penerbangan di wilayah pantai barat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan Nasional di Sumatera Utara.
 - Rekomendasi pembentukan Provinsi Tapanuli dan Provinsi Sumatera Tenggara.
 - Kerjasama regional segitiga pertumbuhan Indonesia - Malaysia - Thailand (Indonesia - Malaysia - Thailand - Growth Triangle).
 - Asosiasi Provinsi Bersaudara (Sister Province Association) Sumatera Utara

BAB IV

VISI DAN MISI

4.1 VISI

Visi daerah Kota Gunungsitoli 2005-2025 adalah ***Kota Gunungsitoli Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan.***

Penjelasan Visi :

- Samaeri berasal dari bahasa Nias yang kata dasarnya adalah ***“FAERI”***. Kata ***‘ FAERI ’*** mengandung pengertian : Mondrorogö yang artinya memelihara, ***Manga’azökhi*** yang artinya memperbaiki, ***Mamahaö*** yang artinya mendidik, ***Molumö’ö*** yang artinya melindungi/mengayomi, ***Mangehao*** yang artinya menuntun, ***Mamohouni*** yang artinya memperbaharui.

Kata ***“ SA ”*** artinya pelaku atau yang melakukan. ***“ SAMAERI ”*** terkandung dalam falsafah ONO NIHA, yang sering diungkapkan dalam pepatah: ***“ Hazendoro sitengakhönia, ha zangehao sitengaso’ono, lösamemondrinara’iö, lö same gönaolofo ”***, yang artinya tidak ada orang lain yang diharapkan untuk memelihara, membangun atau memperbaiki selain kita sendiri.

Jadi kata ***“ SAMAERI ”*** artinya suatu peran dimana pemerintah dan masyarakat memiliki tanggungjawab, komitmen bersama untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih sejahtera secara berkelanjutan.

- Religius, artinya suatu kondisi dimana masyarakat mampu mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari serta senantiasa meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Esa sebagai sumber etika dan moralitas dalam perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Berbudaya, artinya suatu kondisi dimana masyarakat kota Gunungsitoli yang memiliki akar budaya yang kuat dalam jati diri ONO NIHA, mampu menunjukkan eksistensi jati dirinya sebagai masyarakat yang memiliki peradaban untuk menata kehidupan yang lebih baik.
- Berdaya saing berarti suatu kondisi dimana masyarakat dan daerah memiliki kapasitas mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki

secara efisien dan efektif sebagai sumber kemakmuran bagi keberlanjutan eksistensi daerah.

- Ramah Lingkungan, artinya suatu kondisi dimana pemanfaatan dan pendayagunaan sumberdaya alam akan dilakukan secara berkesinambungan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan, dengan tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan lingkungan hidup

4.2 MISI

Untuk mewujudkan Visi daerah Kota Gunungsitoli 2005-2025, maka telah dirumuskan misi daerah sebagai berikut :

- Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan taat hukum.
- Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui akselerasi pembangunan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia yang beriman, cerdas, bermoral, bertika, dan berbudaya.
- Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis kearifan lokal.

Penjelasan Masing-masing Misi sebagai berikut :

- **Misi 1: Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan taat hukum.**

Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru, relative belum optimal dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbatasan sumber daya aparatur yang tersedia, menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Gunungsitoli.

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dibutuhkan aparatur penyelenggara pemerintahan yang memiliki kapabilitas sebagai pengayom sekaligus pelindung kepentingan masyarakat. Untuk mewujudkan kondisi ini dibutuhkan peran pemerintah sebagai regulator yang *kapable*, yang mampu

mewujudkan kualitas pelayanan public dalam tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan taat hukum.

Terwujudnya kehidupan masyarakat yang demokratis dan taat hukum merupakan salah satu indikasi meningkatnya citra pemerintah dimata masyarakat, sehingga memberi ruang yang lebih besar bagi pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan pembangunan, yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan dan keberlanjutan eksistensi daya saing daerah dimasa mendatang.

- **Misi2: *Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui akselerasi pembangunan derajat kesehatan, kesejahteraan social dan pemberdayaan masyarakat.***

Kualitas kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli dewasa ini, pada hakekatnya belum mencerminkan standar kelayakan hidup yang sesungguhnya. Upaya pembangunan pada masa lalu belum mampu secara optimal meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan.

Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Kota Gunungsitoli dalam jangka panjang sangat erat kaitannya dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui perluasan cakupan pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas serta terintegrasi dengan upaya pembangunan lainnya. Faktor lain yang juga memiliki peranan dalam peningkatan kualitas kehidupan adalah pelayanan kesejahteraan social bagi sebagian besar masyarakat penyandang masalah sosial. Kota Gunungsitoli sebagaimana daerah perkotaan pada umumnya, dimasa mendatang memiliki potensi permasalahan dibidang pelayanan kesejahteraan sosial. Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan bagi penyandang masalah sosial untuk layak hidup sebagaimana masyarakat pada umumnya.

Akselerasi pembangunan untuk mewujudkan kualitas kehidupan yang lebih baik, juga sangat erat kaitannya dengan upaya pemberdayaan masyarakat dalam mengelola potensi diri

sehingga memiliki kemandirian untuk menata kehidupan yang lebih baik, sehingga mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan daya saing daerah.

➤ **Misi 3: Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia yang beriman, cerdas, bermoral, bertika, dan berbudaya.**

Kondisi pembangunan sumberdaya manusia di Kota Gunungsitoli dewasa ini, secara umum berorientasi pada penyelenggaraan system pendidikan formal. Penyelenggaraan system pendidikan formal, masih bertumpu pada mekanisme proses belajar mengajar dan belum berorientasi kepada mekanisme penyelenggaraan pendidikan berkualitas.

Pembangunan sumberdaya manusia di Kota Gunungsitoli dalam jangka panjang selain difokuskan pada mekanisme penyelenggaraan system pendidikan formal yang berkualitas, juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan intelektual, yang mampu berinovasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam persaingan global. Disamping itu, pembangunan sumberdaya manusia juga akan diarahkan pada pembangunan karakter generasi muda yang beriman, bermoral dan memiliki etos kerja dalam lingkungan peradaban budaya ONO NIHA.

Predikat ketertinggalan yang disandang masyarakat Nias pada umumnya, sangat dipengaruhi kualitas sumberdaya manusia yang relative masih rendah. Akselerasi pembangunan sumber daya manusia, diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan kemampuan dalam mengelola ragam potensi sumber daya alam yang dimiliki, sehingga memberikan kontribusi bagi peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

➤ **Misi 4: Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis kearifan lokal.**

Kondisi perekonomian daerah secara umum belum mencerminkan struktur perekonomian yang memiliki

kemampuan daya saing dalam berbagai sektor perekonomian daerah. Ragam potensi sumber daya alam yang relative memiliki keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lain, seyogyanya dapat berfungsi sebagai lokomotif perekonomian daerah.

Pengembangan perekonomian daerah dalam jangka panjang, difokuskan pada peningkatan nilai tambah komoditi unggulan daerah berbasis perdagangan, jasa dan industri. Kota Gunungsitoli memiliki infrastruktur strategis yang relatif memadai dibandingkan dengan daerah otonom lainnya di wilayah Kepulauan Nias, diharapkan akan menjadi kutup pertumbuhan ekonomi khususnya di sektor jasa, perdagangan dan industri. Disamping itu. Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias berpotensi menjadi kawasan pusat perdagangan di wilayah pantai barat sumatera,

Untuk mewujudkan struktur perekonomian daerah yang berdaya saing dalam jangka panjang, maka secara bertahap pemerintah daerah akan terus meningkatkan pembangunan infrastruktur strategis yang ada baik dari aspek kualitas maupun kuantitas. Hal ini merupakan salah satu daya tarik investor untuk berinvestasi di Kota Gunungsitoli. Salah satu infrastruktur strategis yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah industry pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Hal ini didukung oleh suplai bahan mentah yang cukup besar dari beberapa daerah otonom di Kepulauan Nias serta faktor ketersediaan infrastruktur strategis yang relatif memadai sehingga memiliki kemampuan produksi yang relatif lebih efisien.

Struktur perekonomian daerah yang berdaya saing, diharapkan akan mampu meningkatkan keberlanjutan eksistensi daerah sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat Kota Gunungsitoli dan Kepulauan Nias pada umumnya.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD secara bertahap.

Tahapan dan prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, tetapi memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

5.1 Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi daerah Kota Gunungsitoli dalam jangka panjang, maka ditetapkan sasaran pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang tahapan dan pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Jangka menengah Menengah Daerah (RPJMD). Adapun sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kota Gunungsitoli 2005-2025 sebagai berikut :

a. Misi 1 :

Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam tatanan kehidupan masyarakat yang demokratis dan taat hukum

Sasaran Pokok :

Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional, beretos kerja, dan anti KKN dalam iklim kehidupan politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan budaya kerja yang memiliki komitmen terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal, fungsional, DPRD dan pengawasan masyarakat.
3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penegakkan hukum serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.
4. Meningkatkan penguatan kelembagaan politik yang demokratis melalui pengembangan wawasan kebangsaan untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan NKRI.
5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan untuk mewujudkan kualitas pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
6. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntable serta mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah dengan tidak membebani masyarakat.
7. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum serta kondisi kehidupan beragama yang toleran, rukun, damai dan saling menghargai perbedaan dalam harmoni kebhinekaan.

b. Misi 2 :

Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui akselerasi pembangunan derajat kesehatan, kesejahteraan sosial dan pemberdayaan masyarakat.

Sasaran Pokok :

Terwujudnya derajat kesehatan, perlindungan sosial, dan keberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara berkesinambungan melalui optimalisasi aksesibilitas terhadap seluruh aspek pembangunan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau.
2. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberian ruang bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan serta menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi yang berlebihan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan simultan dengan upaya pembangunan lainnya yang berbasis kemasyarakatan
5. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penguatan kelembagaan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang menuju keluarga kecil yang sejahtera dan didukung penataan administrasi kependudukan.
6. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi.

c. Misi 3 :

Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia yang beriman, cerdas, bermoral, beretika, dan berbudaya.

Sasaran Pokok :

Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbangunnya karakterdiri sebagai insan religius yang bermartabat.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui optimalisasi aksesibilitas masyarakat terhadap seluruh aspek pembangunan kependidikan.
2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan produksi diseluruh aspek pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk memperoleh kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
4. Pengembangan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda dalam rangka memasuki era persaingan global.
5. Meningkatkan pengembangan budaya berolah raga dan pembinaan prestasi olah raga bagi masyarakat.
6. Meningkatkan kualitas partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan potensi kepemudaan secara berkelanjutan.
7. Meningkatkan penggalan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

d. Misi 4 :

Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing berbasis kearifan lokal.

Sasaran Pokok :

Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri.

Kondisi ini diindikasikan beberapa hal antara lain :

1. Kondisi perekonomian yang semakin baik, yang tercermin melalui produk domestik regional bruto, pertumbuhan ekonomi,

pendapatan percapita, pertumbuhan investasi, tingkat pengangguran, dsb

2. Terbangunnya struktur perekonomian daerah yang kuat yang memberikan peluang berusaha kepada masyarakat, yang mengarah pada peningkatan peran sektor perdagangan, jasa dan industri pengolahan komoditi unggulan daerah
3. Terciptanya pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterpaduan dan keserasian antarsektor perekonomian.
4. Terkelolanya potensi pariwisata (budaya, alam dan bahari) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.
5. Tersedianya prasarana dan sarana ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditi unggulan daerah.
6. Tersedianya jaminan regulasi pemerintah daerah berupa pemberian insentif investasi bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif.
7. Tersedianya infrastruktur strategis yang berkualitas untuk mendukung berbagai aktivitas pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi daerah secara lestari dan ramah lingkungan.
2. Meningkatkan pengembangan industri rumah tangga dan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah
3. Meningkatkan pengembangan industri jasa kepariwisataan secara terintegrasi dengan upaya pembangunan sektor perekonomian lainnya.
4. Meningkatkan pengembangan aktivitas perdagangan dan daya tarik investasi daerah.

5. Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas perdagangan, jasa dan industri.
6. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam berbagai sektor perekonomian
7. Penguatan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
8. Meningkatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung investasi.
9. Meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
10. Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi sumber daya mineral sebagai sumber daya energi alternatif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

5.2 Tahapan dan Prioritas

Sasaran pokok yang telah ditetapkan berdasarkan misi pembangunan daerah dalam jangka panjang, membutuhkan tahapan dan prioritas dalam mewujudkannya melalui agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Setiap sasaran pokok dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat ditetapkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan. Prioritas masing-masing misi dapat dipilih mana yang menjadi prioritas utama yang menggambarkan makna strategis dan urgensi permasalahan sehingga dapat diketahui mana yang harus didahulukan dari yang lain di masing-masing tahapan 5 (lima) tahunan.

Perumusan prioritas pembangunan dilakukan untuk mengurutkan tahap-tahapan pembangunan ke dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Suatu arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari kemungkinan tahapan yang ada.

Suatu sasaran pokok pada hakekatnya dapat merupakan proses berkelanjutan yang harus selalu diwujudkan dari keseluruhan tahapan, yang tercermin dari indikator kinerja yang makin semakin membaik dari tahap ke tahap sehingga target kinerja pada akhir periode jangka panjang dapat dicapai. Sementara, sasaran pokok lainnya dapat bersifat spesifik, yang hanya dicapai pada periode atau tahapan tertentu. Karakteristik lain adalah bahwa suatu sasaran pokok dapat menjadi prasyarat (*enabler*) bagi keberhasilan kinerja (sasaran pokok) lainnya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka tahapan dan prioritas pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Gunungstoli 2005-2025 dapat disusun sebagai berikut:

5.2.1 TAHAPAN LIMA TAHUN I (2006-2010)

Berdasarkan periodisasi pelaksanaan tahapan daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaan tahapan lima tahun pertama Kota Gunungsitoli belum merupakan satu daerah otonom dan masih bergabung dengan Kabupaten Nias sebagai daerah induk pemekaran.

5.2.2 TAHAPAN LIMA TAHUN II (RPJMD 2011-2016)

Kota Gunungsitoli sebagai daerah otonom baru yang terbentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor : 47 tahun 2008, maka untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana periodisasi yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dilaksanakan mulai tahapan kedua daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Gunungsitoli 2011-2016, yang merupakan tahapan kedua pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah diprioritaskan pada peningkatan kualitas kinerja pelayanan birokrasi daerah untuk mendorong upaya percepatan peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat dan daya saing perekonomian daerah.

Kinerja pelayanan birokrasi daerah yang meliputi komponen kelembagaan, regulasi dan sumber daya manusia aparatur, akan tercermin dari indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Untuk meningkatkan indeks kepuasan masyarakat Kota Gunungsitoli terhadap kinerja pelayanan publik, maka kebijakan pembangunan yang difokuskan pada tahapan ini yakni

- ❖ Pengembangan sistem pemerintahan dan birokrasi daerah yang bersih dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, yang

didukung penegakkan hukum dan pengawasan yang terintegrasi,.

- ❖ Penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berorientasi pada penyederhanaan birokrasi, yang didukung oleh aparatur yang profesional, berwawasan luas, menguasai bidang tugasnya, dan berdedikasi tinggi.
- ❖ Peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur daerah secara struktural dan fungsional serta memiliki keahlian teknis yang mendukung kualitas fungsi pelayanan
- ❖ Pengembangan hubungan koordinasi, komunikasi dan sinergitas antar level pemerintahan dalam kebijakan pembangunan lintas sektor, lintas pelaku dan lintas wilayah melalui kesepahaman program dan kegiatan pembangunan.
- ❖ Terciptanya tatanan kehidupan yang demokratis melalui penataan sistem dan kelembagaan politik daerah yang dilandasi pada nilai-nilai demokrasi lokal yang disesuaikan dengan kemampuan dan daya cerna masyarakat terhadap pesan-pesan politik.
- ❖ Peningkatan penegakan hukum, penghormatan dan perlindungan hak-hak masyarakat
- ❖ Terbangunnya sarana dan prasarana pemerintahan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi, efektifitas dan urgensi dukungannya terhadap kelancaran roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan.

Upaya untuk mendorong percepatan kesejahteraan masyarakat dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur strategis, penyelenggaraan pendidikan berkualitas, peningkatan derajat kesehatan masyarakat, pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesejahteraan sosial, dan peningkatan ketahanan pangan.

Peningkatan kualitas infrastruktur strategis diarahkan pada pemerataan akses infrastruktur strategis antar wilayah, daerah sentra-sentra produksi, tempat fasilitas umum maupun daerah yang relatif terisolir, yang tercermin pada antara lain: panjang jalan dengan kondisi baik, cakupan pelayanan daerah irigasi, pemenuhan kebutuhan air bersih, penanganan persampahan, lingkungan sehat perumahan dan permukiman, lancarnya arus transportasi, ruang terbuka hijau, dsb. Pembangunan infrastruktur strategis antara lain difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan, irigasi, air minum, pengendalian sungai dan pengamanan pantai, perumahan dan permukiman, sarana dan prasarana perhubungan, lingkungan hidup dan pengendalian dampak bencana alam.

Pembangunan sumber daya manusia diarahkan pada peningkatan kualitas kompetensi sumber daya manusia, yang tercermin antara lain pada : indeks pembangunan manusia, angka melek huruf, angka partisipasi sekolah angka putus sekolah, dan tingkat pengangguran. Penyelenggaraan pendidikan berkualitas sebagai salah satu upaya pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan peserta didik, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas, peningkatan kesejahteraan guru, pengembangan kurikulum berbasis kompetensi, pengembangan rintisan sekolah bertaraf internasional, peningkatan akreditasi sekolah, pengembangan sekolah kejuruan berbasis potensi kearifan lokal, dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pembelajaran.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada hakekatnya bukan hanya pada aspek pengembangan kecerdasan intelektual, namun dibarengi dengan pembangunan karakter yang bersumber dari nilai-nilai ajaran agama dan nilai-nilai luhur

budaya. Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan pada pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya daerah sebagai identitas dan jati diri daerah, yang diharapkan sebagai modal dasar dalam pembangunan karakter sumber daya manusia. Di samping itu, peran pemuda dan olah raga dalam pengembangan potensi sumber daya manusia harus terus mendapat ruang yang semakin besar, melalui peningkatan kualitas peran dan fungsi pemuda dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan serta pembinaan prestasi olah raga dan ketersediaan sarana dan prasarana olah raga.

Untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam berbagai sektor perekonomian, upaya pembangunan sumber daya manusia difokuskan pada peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pengembangan balai tenaga kerja, peningkatan keterampilan masyarakat dalam pemanfaatan teknologi berproduksi, pengembangan wawasan ketenagakerjaan, dan perlindungan jaminan ketenagakerjaan.

Peningkatan derajat kesehatan masyarakat akan tercermin pada angka usia harapan hidup, penurunan angka kematian ibu dan bayi, terpenuhinya gizi masyarakat dan tertanganinya berbagai penyakit menular. Pembangunan bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan kebutuhan dasar dibidang kesehatan melalui pembangunan sarana dan prasarana kesehatan, peningkatan pemenuhan tenaga medis dan para medis, pengadaan perbekalan dan obat-obat kesehatan, peningkatan penanganan prevelansi gizi buruk dan kurang, peningkatan pencegahan dan penanganan penyakit menular, serta peningkatan jaminan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu atau miskin.

Upaya pemberdayaan masyarakat akan diarahkan pada peningkatan keberdayaan dan keswadayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan tatanan kehidupan, yang tercermin pada tingkat penduduk miskin, tingkat partisipasi perempuan,

pemenuhan hak-hak dasar anak, laju pertumbuhan penduduk, dan kemandirian Keluarga Berencana. Pembangunan pemberdayaan masyarakat difokuskan pada peningkatan peran dan fungsi kelembagaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, penguatan kelembagaan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB).

Penyelenggaran kesejahteraan sosial diarahkan pada terjaminnya perlindungan dan pembinaan terhadap para penyandang masalah sosial yang tercermin melalui ketersediaan fasilitas pelayanan kesejahteraan sosial, kualitas kehidupan para penyandang masalah sosial, dan rasio penduduk penyandang masalah kesejahteraan sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial difokuskan antara lain pada pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial, pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial, pembinaan eks penyandang masalah sosial, anak terlantar, anak cacat, panti asuhan, dan panti jompo.

Peningkatan ketahanan pangan diarahkan pada terjaminnya pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan, yang tercermin pada produksi bahan pangan, keanekaragaman bahan pangan, dan kualitas bahan pangan yang dikonsumsi masyarakat. Pembangunan ketahanan pangan difokuskan antara lain : peningkatan kapasitas penyuluh, intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, dan peningkatan pemanfaatan teknologi produksi pangan.

Kota Gunungsitoli sebagaimana ciri khas kota pada umumnya, secara bertahap pengembangan sektor perekonomian daerah diarahkan pada sektor perdagangan, jasa dan industri. Peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri diharapkan akan menciptakan daya saing perekonomian daerah yang semakin tangguh dan daya tarik investasi.

Kondisi perekonomian yang semakin baik, yang tercermin melalui produk domestik regional bruto, pertumbuhan

ekonomi, pendapatan perkapita, pertumbuhan investasi, tingkat pengangguran, dsb. Struktur perekonomian daerah yang semakin kuat dan kokoh selain memberikan peluang berusaha kepada masyarakat, juga akan menciptakan pemerataan dan penyeimbangan pertumbuhan ekonomi berdasarkan keterpaduan dan keserasian antar sektor perekonomian.

Pengelolaan potensi perekonomian daerah membutuhkan sarana dan pra sarana ekonomi yang handal dalam mempercepat proses produksi, promosi, distribusi dan pemasaran hasil-hasil komoditi unggulan daerah di sektor perdagangan, jasa dan industri. Demikian juga halnya ketersediaan jaminan regulasi daerah berupa pemberian insentif investasi bagi penciptaan iklim investasi yang kondusif serta infrastruktur strategis yang berkualitas, untuk mendukung berbagai aktivitas pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal, merupakan prioritas utama dalam mewujudkan Kota Gunungsitoli sebagai pusat aktivitas perdagangan, jasa dan industri di Kepulauan Nias. Di samping itu, posisi strategis Kota Gunungsitoli sebagai pintu gerbang Kepulauan Nias, diharapkan akan meningkatkan potensi pengembangan jasa kepariwisataan. Untuk mewujudkan kondisi dimaksud, kebijakan pembangunan bidang kepariwisataan akan diselaraskan dengan upaya-upaya mengoptimalkan fungsi-fungsi kota pada umumnya sebagai pusat perdagangan, jasa dan industri.

Fokus kebijakan strategis lainnya terkait dengan pengembangan daya saing perekonomian daerah peningkatan pengelolaan sumber daya alternatif dan pemanfaatan potensi sumber daya mineral, untuk mendukung kebutuhan energi daerah dalam jangka panjang khususnya kebutuhan aktivitas perdagangan, jasa dan industri yang diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu.

5.2.3 TAHAPAN LIMA TAHUN III (RPJMD 2016-2021)

Pelaksanaan tahapan lima tahun ketiga daripada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah berlandaskan pencapaian dan keberlanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2011-2016), ditujukan untuk lebih mengoptimalkan upaya pembangunan secara menyeluruh di berbagai aspek dan tatanan kehidupan dengan penekanan pada terbangunnya struktur perekonomian daerah yang berdaya saing dengan didukung tata kelola pemerintahan yang baik, sumber daya manusia berkualitas serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Seiring meningkatnya kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dalam tatanan kehidupan politik masyarakat yang demokratis, aman, tertib dan taat hukum serta berkembangnya kualitas sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, yang merupakan pencapaian tahapan lima tahun kedua RPJPD, maka memasuki tahapan lima tahun ketiga ini Kota Gunungsitoli berada pada kondisi yang cukup baik untuk mendorong percepatan daya saing daerah dalam berbagai aspek dan dimensi pembangunan.

Struktur perekonomian Kota Gunungsitoli semakin kokoh dan berdaya saing, ditandai dengan semakin terpadunya aktivitas perdagangan, jasa dan industri dengan pengelolaan produk-produk unggulan daerah secara berkelanjutan. Kondisi ini didukung penataan kelembagaan dan iklim usaha untuk mendorong peningkatan efisiensi, penguasaan dan penerapan teknologi dalam kegiatan produksi oleh masyarakat dalam berbagai sektor perekonomian. Ketersediaan infrastruktur strategis yang mendukung berkembangnya aktivitas perdagangan, jasa dan industri harus dijamin pemenuhannya tahapan lima tahun ketiga ini.

Kualitas sumber daya manusia harus dapat didorong untuk terus mengalami peningkatan secara berkelanjutan. Hal ini tercermin dari peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan dengan kebutuhan lapangan kerja serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin membudaya dengan didukung pelayanan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Demikian juga halnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, kesetaraan gender; kesejahteraan dan perlindungan anak, jaminan kesejahteraan sosial, serta mantapnya budaya dan karakter masyarakat, harus tetap menjadi perhatian dalam dalam tahapan ini untuk mewujudkan kualitas kesejahteraan masyarakat yang berkesinambungan dengan upaya pembangunan lainnya.

Pembangunan berkelanjutan yang semakin baik dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari. Pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang semakin baik dibarengi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat.

Kebijakan strategis lainnya dalam tahapan lima tahun ketiga ini adalah terbentuknya kawasan dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru seperti : kawasan industri, kerajinan, pariwisata, Kota Baru dan pemanfaatan sumber daya mineral yang semakin meningkat seperti Batu Bara, serta peningkatan kapasitas pelabuhan laut dan bandar udara, diharapkan mampu mempercepat peningkatan daya saing perekonomian daerah.

5.2.4 TAHAPAN LIMA TAHUN IV (RPJMD 2021-2025)

Berdasarkan pencapaian tahapan lima tahun ketiga, maka tahapan lima tahun keempat ditujukan kepada

terwujudnya Kota Gunungsitoli, kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan melalui percepatan upaya pembangunan yang terintegrasi dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat dengan penekanan pada terciptanya struktur ekonomi daerah yang semakin berdaya saing secara berkelanjutan dengan didukung sumber daya manusia yang berkualitas dan pemanfaatan potensi sumber daya alam berbasis perdagangan, jasa dan industri secara lestari dan ramah lingkungan.

Pada tahapan ini, semua hasil capai selama tahapan sebelumnya harus dapat terus ditingkatkan kualitas pertumbuhannya sehingga memiliki daya tahan yang berkelanjutan sebagai sumber kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat. Struktur ekonomi daerah pada tahapan ini menggambarkan kontribusi yang signifikan dari sektor perdagangan, jasa dan industri. Sektor primer yang semakin menurun kontribusinya terhadap struktur perekonomian daerah, masih tetap anggap penting peranannya. Potensi sumber daya alam daerah yang semakin terbatas harus dapat dikelola secara efisien untuk menjaga kelestariannya. Demikian juga halnya, aktivitas pasca panen sumber daya alam berbasis industri pengolahan harus senantiasa mempertimbangkan kualitas lingkungan hidup sekitarnya.

Salah satu indikasi peningkatan citra Kota Gunungsitoli pada tahapan ini yakni berkembangnya industri kepariwisataan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah. Sarana dan prasarana kepariwisataan yang semakin meningkat kualitas dan cakupan pelayanannya, diharapkan akan menjadikan Kota Gunungsitoli daerah tujuan wisata berbasis perdagangan, jasa dan industri di wilayah Kepulauan Nias dan pantai barat pulau Sumatera.

Indikasi kesejahteraan masyarakat harus mampu menunjukkan ukuran-ukuran nyata seperti peningkatan

pendapatan per kapita penduduk, peningkatan indeks pembangunan manusia, rendahnya tingkat pengangguran, meningkatnya angka melek huruf dan angka partisipasi sekolah, menurunnya angka metaian ibu dan balita, tersedianya lapangan kerja, meningkatnya daya beli masyarakat, meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat, tercukupinya kebutuhan energi, air, bahan pangan bermutu dan bergizi secara merata, mantapnya sistem pengelolaan kesehatan, sistem jaminan sosial dan lain-lain. Hal-hal yang masih dinilai lemah perlu diperbaiki, ditumbuhkan dan dimantapkan dalam tahap ini termasuk peningkatan volume dan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, pembangunan transportasi laut dan udara, sumberdaya air, sumber energi alternatif yang mampu mengikuti pertumbuhan kebutuhan dalam menunjang pembangunan ekonomi dan wilayah secara berkelanjutan.

Kualitas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik harus terus ditingkatkan untuk menumbuhkan kepercayaan dan indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Lembaga-lembaga dan pranata ekonomi juga lebih dimantapkan, demikian juga lembaga dan sistem pengendalian lingkungan, lembaga dan sistem ketahanan sosial yang mampu menjamin tumbuh dan berkembangnya rasa persatuan dan kesatuan dalam keberagaman suku, etnis, agama, daerah, lapangan pekerjaan dan profesi, dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

TABEL 5.1
VISI, MISI, SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI 2005-2025

VISI : Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan					
MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	
1	2	3	4	5	
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dan Taat Hukum	1. Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional, beretos kerja, dan anti KKN dalam iklim kehidupan politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	90 persen	1. Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan budaya kerja yang memiliki komitmen terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.	
		Indeks Persepsi Korupsi	90 persen*		
		Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	95 Persen	2. Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal, fungsioanl, DPRD dan pengawasan masyarakat.	
		Penerapan Standar Pelayanan Minimal	95 persen		
		Tindak lanjut pengawasan	90 persen		
		Kapasitas Kelembagaan DPRD	90 persen		
		Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan	90 persen**		
		Penegakkan Peraturan Daerah	99 persen		3. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penegakkan hukum serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.
		Tingkat Kriminalitas	0,05 persen		
		Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia	99 persen		

VISI : Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dalam Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Demokratis dan Taat Hukum	Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional, beretos kerja, dan anti KKN dalam iklim kehidupan politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum	Partisipasi masyarakat dalam bidang politik	99 persen**	4. Meningkatkan penguatan kelembagaan politik yang demokratis melalui pengembangan wawasan kebangsaan untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam meniaga keutuhan NKRI
		Pendidikan Politik Masyarakat	90 persen	
		Kapasitas Kelembagaan Politik dan Organisasi memasyarakatkan	90 persen	
		Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	90 persen**	5. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan untuk mewujudkan kualitas pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.
		Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan	90 persen	
		Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	90 persen	6. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah dengan tidak membebani masyarakat.
		Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	95 persen	
		Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Lingkungan yang Kondusif	95 persen**	7. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum serta kondisi kehidupan beragama yang toleran, rukun, damai dan saling menghargai perbedaan dalam harmoni kebhinekaan.
		Pembinaan kerukunan umat beragama	95 persen	
Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama	95 persen			

VISI : Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
<p>MISI 2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat melalui Akselarasi Pembangunan Derajat Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>2. Terwujudnya derajat kesehatan, perlindungan sosial, dan keberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek dan sendi-sendi kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan.</p>	Usia Harapan Hidup	80 Tahun	1. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara berkesinambungan melalui optimalisasi aksesibilitas terhadap seluruh aspek pembangunan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau.
		Indeks Pembangunan Manusia	78,90 persen	
		Angka Kematian Ibu	10 Per KH	
		Angka Kematian Bayi	5 Per KH	
		Angka Kematian Balita	7 Per KH	
		Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk	5 persen	
		Swasembada Pangan	95 persen	
		Jaminan Layanan Kesejahteraan Sosial	95 persen	2. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.
		Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	95 persen**	3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberian ruang bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan .serta menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi yang berlebihan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.
		Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	95 persen	
		Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	90 persen**	
		Pertumbuhan Penduduk	0,05 persen	5. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penguatan kelembagaan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas menuju keluarga kecil yang sejahtera dan didukung penataan administrasi kependudukan.
Jumlah Akseptor KB	50.000 orang			
Keluarga Sejahtera	95 persen			
Jumlah Penduduk Miskin	5 persen	6. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi		

VISI : Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
<p>Misi 3 : Meningkatkan Pengembangan Sumber Daya Manusia Yang Beriman, Cerdas, Bermoral, Beretika dan Berbudaya</p>	<p>3. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbangunnya karakter diri sebagai insan religius yang bermartabat.</p>	Angka Melek Huruf	100 persen	1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui optimalisasi aksesibilitas masyarakat terhadap seluruh aspek pembangunan kependidikan.
		Angka Partisipasi Sekolah	100 persen	
		Wajib Belajar 12 Tahun	100 Persen	
		Kapasitas Produksi Masyarakat	95 persen	2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan produksi diseluruh aspek pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal
		Tingkat Pengangguran	0,05 persen	3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk memperoleh kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
		Daya serap tenaga kerja	95 Persen	
		Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	95 Persen	4. Pengembangan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda dalam rangka memasuki era persaingan global.
		Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	90 Persen	5. Meningkatkan pengembangan budaya berolah raga dan pembinaan prestasi olah raga bagi masyarakat.
		Peningkatan Prestasi Olah Raga	90 Persen	
		Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	90 Persen**	6. Meningkatkan kualitas partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan potensi kepemudaan secara berkelanjutan.
Pelestarian Nilai-nilai Budaya	90 Persen	7. Meningkatkan penggalan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.		

VISI : Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
<p>Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Berbasis Kearifan Lokal</p>	<p>4. Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri.</p>	Efisiensi pemanfaatan SDA yang Ramah Lingkungan	95 Persen	1 Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi daerah secara lestari dan ramah lingkungan.
		Rasio Kawasan Budidaya	100 persen sesuai RTRW	
		Produktivitas sektor Industri	95 persen	2 Meningkatkan pengembangan industri rumah tangga dan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah
		Produktivitas sektor Industri Jasa Kepariwisata	95 persen	3 Meningkatkan pengembangan industri jasa kepariwisataan secara terintegrasi dengan upaya pembangunan sektor perekonomian lainnya.
		Produktivitas Sektor Perdagangan	95 persen	4 Meningkatkan pengembangan aktivitas perdagangan dan daya tairk investasi daerah.
		Ruas Jalan/Jembatan dalam Kondisi Baik	95 persen	5 Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung akativitas perdagangan, jasa dan industri.
		Cakupan Pelayanan Saluran Irigasi	95 persen	
		Cakupan Pelayanan Air Bersih	95 persen	
		Panjang alur sungai dan Garis Pantai dalam kondisi baik	90 persen	
		Kapasitas Pelabuhan Laut	90 persen	
		Kapasitas Pelabuhan Udara	90 persen	
		Kapasitas Pelayanan Transportasi Darat	90 persen	
		Cakupan Pelayanan Telekomunikasi	90 persen	
		Kapasitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	95 persen	
Kapasitas Industri Pengolahan	90 persen			

VISI : Kota Gunungsitoli, Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan

MISI	SASARAN POKOK	INDIKATOR	TARGET	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
1	2	3	4	5
<p>Misi 4 : Meningkatkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Berbasis Kearifan Lokal</p>	<p>Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri.</p>	PDRB ADH Berlaku	Rp. 20 T	6 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam berbagai sektor perekonomian
		PDRB ADH Konstan	Rp. 19,5 T	
		Pertumbuhan Ekonomi	7,7 persen	
		Pertumbuhan Daya Beli Masyarakat	95 persen	
		Distribusi Pendapatan	0,1***	7 Penguatan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.
		Ketimpangan Pembangunan	0,1***	
		Pertumbuhan Investasi	95 persen	8 Meningkatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung investasi.
		Persentase wilayah yang bebas pencemaran	90 persen	9 Meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.
		Ruang Terbuka Hijau	30 persen sesuai RTRW	
		Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	95 persen	
		Cakupan Pelayanan Sanitasi	90 persen	
		Cakupan Pelayanan Kebutuhan Energi	95 persen	10 Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi sumber daya mineral sebagai sumber daya energi alternatif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
		Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Energi Alternatif	85 persen	

*skala 0 sampai dengan 100, Angka 0 berarti paling korup, angka 100 paling bersih

** skala 0 sampai dengan 100, Angka 0 berarti tidak partisipatif , angka 100 paling partisipatif

***Rasio Gini 0 sampai dengan 1, $G < 0.3$ = ketimpangan rendah, $0.3 < G < 0.5$ = ketimpangan sedang, $G > 0.5$ = ketimpangan tinggi

TABEL 5.2
TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI 2005-2025

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
Sasaran Pokok 1 : Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional, beretos kerja, dan anti KKN dalam iklim kehidupan politik yang demokratis serta menjunjung tinggi supremasi hukum							
1 Meningkatkan profesionalisme aparatur daerah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, pelayanan publik yang berkualitas, dan budaya kerja yang memiliki komitmen terhadap percepatan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme.	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	50 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
	Indeks Persepsi Korupsi	20 persen *		50 persen *	70 persen	80 persen	80 persen *
	Kompetensi Sumber Daya Manusia Aparatur	40 persen		75 persen	85 persen	95 Persen	95 Persen
	Penerapan Standar Pelayanan Minimal	10 persen		70 persen	80 persen	95 persen	95 Persen
2 Meningkatkan efektifitas pengawasan melalui koordinasi dan sinergitas pengawasan internal, eksternal, fungsioanl, DPRD dan pengawasan masyarakat.	Tindak lanjut pengawasan	10 persen		65 persen	75 persen	90 persen	90 persen
	Kapasitas Kelembagaan DPRD	20 persen		70 persen	85 persen	90 persen	90 persen
	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pembangunan	10 persen**		65 persen**	80 persen**	90 persen**	90 persen**
3 Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penegakkan hukum serta pengakuan dan perlindungan terhadap hak azasi manusia.	Penegakkan Peraturan Daerah	10 persen		70 persen	85 persen	99 persen	99 persen
	Tingkat Kriminalitas	20 persen		10 persen	5 persen	0,05 persen	0,05 persen
	Perlindungan Hak-Hak Azasi Manusia	20 persen		70 persen	90 persen	99 persen	99 persen

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
4 Meningkatkan penguatan kelembagaan politik yang demokratis melalui pengembangan wawasan kebangsaan untuk menciptakan kesadaran dan tanggung jawab moral dalam menjaga keutuhan NKRI	Partisipasi masyarakat dalam bidang politik	50 persen **		65 persen **	75 Persen **	85 Persen **	85 persen**
	Pendidikan Politik Masyarakat	10 persen		50 persen	70 persen	80 persen	80 persen
	Kapasitas Kelembagaan Politik dan Organisasi Kemasyarakatan	10 persen		50 persen	75 persen	85 persen	85 persen
5 Meningkatkan koordinasi dan kerjasama pembangunan untuk mewujudkan kualitas pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan.	Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan	20 persen **		75 persen **	95 Persen **	99 Persen **	99 persen**
	Koordinasi dan Kerjasama Pembangunan	5 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
6. Meningkatkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta mendorong kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan melalui optimalisasi penggalan sumber-sumber pendapatan dan pengelolaan aset daerah dengan tidak membebani masyarakat.	Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah	20 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
	Peningkatan Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	20 persen		70 persen	85 persen	95 persen	95 persen
7. Meningkatkan kualitas keamanan dan ketertiban umum serta kondisi kehidupan beragama yang toleran, rukun, damai dan saling menghargai perbedaan dalam harmoni kebhinekaan.	Partisipasi Masyarakat dalam menjaga Lingkungan yang Kondusif	20 persen**		70 persen**	85 persen**	95 persen**	95 persen**
	Pembinaan kerukunan umat beragama	20 persen		70 persen	85 persen	95 persen	95 persen
	Toleransi dalam kehidupan antar umat beragama	20 persen		70 persen	85 persen	95 persen	95 persen

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
Sasaran Pokok 2 : Meningkatkan Kualitas Kehidupan Masyarakat melalui Akselerasi Pembangunan Derajat Kesehatan, Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat							
1. Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat secara berkesinambungan melalui optimalisasi aksesibilitas terhadap seluruh aspek pembangunan pelayanan kesehatan yang berkualitas, murah dan terjangkau.	Usia Harapan Hidup	68 tahun		71 tahun	76 tahun	80 tahun	80 Tahun
	Indeks Pembangunan Manusia	71,67 persen		74,28 persen	76,98 persen	78,90 persen	78,90 persen
	Angka Kematian Ibu	357 KH		102 KH	20 KH	10 KH	10 Per KH
	Angka Kematian Bayi	56 KH		23 KH	10 KH	5 KH	5 Per KH
	Angka Kematian Bayi	56 KH		32 KH	12 KH	7 KH	7 Per KH
	Prevalensi Gizi Kurang dan Buruk	20 persen		15 persen	10 persen	5 persen	5 persen
	Swasembada Pangan	40 persen		65 persen	75 persen	95 persen	95 Persen
2. Meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial.	Jaminan Layanan Kesejahteraan Sosial	10 persen		75 persen	85 persen	95 persen	95 persen
3. Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pemberian ruang bagi peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan, serta menurunkan tindak kekerasan, eksploitasi yang berlebihan dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak.	Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	10 persen **		70 persen **	90 Persen **	95 Persen **	95 persen**
	Jaminan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak	5 persen		65 persen	85 Persen	95 Persen	95 persen
4. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat yang terintegrasi dan simultan dengan upaya pembangunan lainnya yang berbasis kemasyarakatan	Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan	10 persen **		70 persen **	80 Persen **	90 Persen **	90 persen**

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
5. Meningkatkan pengendalian laju pertumbuhan penduduk melalui penguatan kelembagaan jaringan pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang berkualitas menuju keluarga kecil yang sejahtera dan didukung penataan administrasi kependudukan.	Pertumbuhan Penduduk	0,51 persen		0,45 persen	0,10 persen	0,05 persen	0,05 persen
	Jumlah Akseptor KB	10.336 orang		10.836 orang	35.000 orang	50.000 orang	50.000 orang
	Keluarga Sejahtera	10 persen		75 persen	85 persen	95 persen	95 persen
6. Penanggulangan kemiskinan yang diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi	Jumlah Penduduk Miskin	33,85 persen		15,04 persen	10 persen	5 persen	5 persen
Sasaran Pokok 3 : Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta terbangunnya karakter diri sebagai insan religius yang bermartabat.							
1. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan melalui optimalisasi aksesibilitas masyarakat terhadap seluruh aspek pembangunan kependidikan.	Angka Melek Huruf	94,75 persen		97,43 persen	98,97 persen	100 persen	100 persen
	Angka Partisipasi Sekolah	80,25 persen		80,63 persen	90 persen	100 persen	100 persen
	Wajib Belajar 12 Tahun	80,25 persen		80,63 persen	90 persen	100 persen	100 persen
2. Meningkatkan kualitas keterampilan masyarakat untuk memanfaatkan teknologi dalam kegiatan produksi diseluruh aspek pengelolaan potensi sumber daya ekonomi lokal	Kapasitas Produksi Masyarakat	30 persen		70 persen	85 persen	95 persen	95 persen
3. Meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja untuk memperoleh kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.	Tingkat Pengangguran	2,56 persen		2 persen	1 persen	0,05 persen	0,05 persen
	Daya serap tenaga kerja	20 persen		75 persen	85 persen	95 persen	95 Persen

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
4. Pengembangan budaya inovatif berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi bagi generasi muda dalam rangka memasuki era persaingan global.	Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	10 persen		70 persen	85 persen	95 persen	95 Persen
5. Meningkatkan pengembangan budaya berolah raga dan pembinaan prestasi olah raga bagi masyarakat.	Ketersediaan Sarana dan Prasarana Olah Raga	5 persen		70 persen	85 persen	90 persen	90 Persen
	Peningkatan Prestasi Olah Raga	5 persen		65 persen	80 persen	90 persen	90 Persen
6. Meningkatkan kualitas partisipasi pemuda dalam pembangunan melalui pembinaan dan pengembangan potensi kepemudaan secara berkelanjutan.	Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	5 persen**		60 persen**	75 persen**	90 persen**	90 Persen**
7. Meningkatkan penggalan dan pelestarian nilai-nilai luhur budaya secara terpadu dan terintegrasi dengan melibatkan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.	Pelestarian Nilai-nilai Budaya	5 persen		65 persen	80 persen	90 persen	90 Persen
Sasaran Pokok 4 : Terwujudnya peningkatan nilai tambah produk-produk unggulan daerah yang berbasis perdagangan, jasa dan industri.							
1 Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi daerah secara lestari dan ramah lingkungan.	Efisiensi pemanfaatan SDA yang Ramah Lingkungan	5 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 Persen
	Rasio Kawasan Budidaya	5 persen		75 persen	90 persen	100 persen	100 persen sesuai RTRW
2 Meningkatkan pengembangan industri rumah tangga dan industri pengolahan berbasis komoditi unggulan daerah	Produktivitas sektor Industri	5 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
3 Meningkatkan pengembangan industri jasa kepariwisataan secara terintegrasi dengan upaya pembangunan sektor perekonomian lainnya.	Produktivitas sektor Jasa Kepariwisata	5 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
4 Meningkatkan pengembangan aktivitas perdagangan dan daya tarik investasi daerah.	Produktivitas Sektor Perdagangan	30 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
5 Meningkatkan pengembangan infrastruktur strategis yang mendukung aktivitas perdagangan, jasa dan industri.	Ruas Jalan/Jembatan dalam Kondisi Baik	30 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
	Cakupan Pelayanan Saluran Irigasi	10 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
	Cakupan Pelayanan Air Bersih	5 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
	Panjang alur sungai dan Garis Pantai dalam kondisi baik	5 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
	Kapasitas Pelabuhan Laut	20 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
	Kapasitas Pelabuhan Udara	10 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
	Kapasitas Pelayanan Transportasi Darat	10 persen		70 persen	80 persen	90 persen	90 persen
	Cakupan Pelayanan Telekomunikasi	5 persen		65 persen	75 persen	90 persen	90 persen
	Kapasitas Sarana dan Prasarana Perdagangan	10 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
	Kapasitas Industri Pengolahan	5 persen		65 persen	75 persen	90 persen	90 persen
6 Meningkatkan perluasan kesempatan kerja dalam berbagai sektor perekonomian	PDRB ADH Berlaku	Rp. 2 T		Rp.3,8 T	Rp.15 T	Rp. 20 T	Rp. 20 T
	PDRB ADH Konstan	Rp. 800 M		Rp.3,3 T	Rp.13 T	Rp. 19,5 T	Rp. 19,5 T
	Pertumbuhan Ekonomi	7,45 persen		7,02 persen	7,31 persen	7,7 persen	7,7 persen
	Pertumbuhan Daya Beli Masyarakat	30 persen		65 persen	75 persen	95 persen	95 persen
7 Penguatan kegiatan ekonomi di wilayah-wilayah cepat tumbuh dan strategis dalam satu sistem wilayah pengembangan ekonomi.	Distribusi Pendapatan	0,7***		0,4***	0,2***	0,1***	0,1***
	Ketimpangan Pembangunan	0,8***		0,5***	0,3***	0,2***	0,2***

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR	KONDISI AWAL KINERJA PEMBANGUNAN	TARGET				KONDISI AKHIR KINERJA PEMBANGUNAN
			TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	
8 Meningkatkan pengembangan iklim usaha yang kondusif melalui peningkatan kualitas sistem pelayanan investasi, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung investasi.	Pertumbuhan Investasi	5 persen		65 persen	75 persen	95 persen	95 persen
9 Meningkatkan daya dukung lingkungan dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.	Persentase wilayah yang bebas pencemaran	10 persen		65 persen	70 persen	90 persen	90 persen
	Ruang Terbuka Hijau	5 persen		20 persen	25 persen	30 persen	30 persen sesuai RTDW
	Pengelolaan Kebersihan dan Persampahan	10 persen		65 persen	75 persen	95 persen	95 persen
	Cakupan Pelayanan Sanitasi	5 persen		70 persen	75 persen	90 persen	90 persen
10 Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi sumber daya mineral sebagai sumber daya energi alternatif dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.	Cakupan Pelayanan Kebutuhan Energi	30 persen		75 persen	80 persen	95 persen	95 persen
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Energi Alternatif	5 persen		60 persen	70 persen	85 persen	85 persen

Keterangan

*skala 0 sampai dengan 100, Angka 0 berarti paling korup, angka 100 paling bersih

** skala 0 sampai dengan 100, Angka 0 berarti tidak partisipatif , angka 100 paling partisipatif

***Rasio Gini 0 sampai dengan 1, $G < 0.3$ = ketimpangan rendah, $0,3 < G < 0,5$ = ketimpangan sedang, $G > 0,5$ = ketimpangan tinggi

BAB VI

KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Gunungsitoli Tahun 2005-2025 merupakan dokumen perencanaan yang berfungsi sebagai kerangka acuan bagi pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan di Kota Gunungsitoli kurun waktu 20 tahun kedepan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini, secara periodic dan bertahap diimplementasikan melalui Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD). Selanjutnya RPJPD ini juga merupakan pedoman bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyusun visi, misi, dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RPJMD.

Untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah dalam mewujudkan visi Kota Gunungsitoli Kota SAMAERI yang Religius, Berbudaya, Berdaya Saing, dan Berwawasan Lingkungan, membutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah, para pemangku kepentingan dan seluruh elemen masyarakat, untuk secara bersama-sama menggalang kebersamaan mengawal setiap kebijakan pembangunan yang akan diimplementasikan sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.

Gunungsitoli, 6 Agustus 2012

WALIKOTA GUNUNGSITOLI,



MARTINUS LASE